

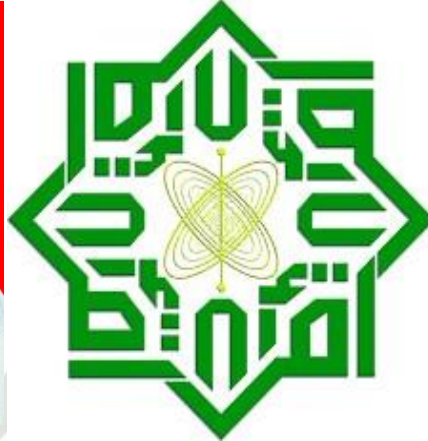


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN

**Pengaruh Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
Dalam Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Solok
Selatan)**



DESRI HELEN SUTAMA

NIM: 11673201429

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2020

UIN SUSKA RIAU

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DESRI HELEN SUTAMA
 NIM : 11673201429
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : AKUNTANSI S1
 JUDUL : Pengaruh Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan)

DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING

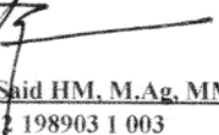

Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA
 NIP. 19780808 200710 1 003

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN




H. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003


Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA
 NIP. 19780808 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Desri Helen Utama
: 11673201429
: Ekonomi Dan Ilmu Sosial
: Akuntansi S1
: Pengaruh Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan)
: 12 Oktober 2020

PANITIA PENGUJI

KETUA

Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI

PENGUJI I

Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak, CA
NIP. 19761217 200901 1 014

PENGUJI II

Ikhwani Ratna, SE, M. Si, Ak, CA
NIP. 19830827 201101 1 014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pengaruh Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Studi empiris pada Kantor Inspektorat Kab. Solok Selatan

Desri Helen Utama

NIM : 11673201429

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

2019

Permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia saat ini salah satunya yaitu kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya temuan hasil pemeriksaan BPK tentang kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Dalam hal ini terdapat peran auditor internal pemerintah yang sangat diharapkan agar terciptanya sistem pengendalian yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran APIP dalam pelaksanaan Maturitas SPIP pada Inspektorat Kab. Solok Selatan.

Jenis penelitian adalah kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pengawas internal pemerintah pada Inspektorat Kab. Solok Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Teknik pengujian instrument menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan, pengawas internal, konsultan, dan katalisator berpengaruh positif terhadap pelaksanaan maturitas SPIP. Sedangkan peran penjamin mutu berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan maturitas SPIP.

Kata Kunci: peran apip, spip, kepemimpinan, pengawas internal, konsultan, penjamin mutu, dan katalisator



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

The Influence of the Role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in the Implementation of the Maturity of the Government Internal Control System (SPIP)

Empirical study at the Inspectorate Office of Kab. South Solok

Desri Helen Utama

NIM: 11673201429

Sultan Syarif Kasim State Islamic University

2019

One of the problems that still occur in Indonesia today is the weakness of the Government Internal Control System (SPIP). This is indicated by the many findings of BPK's examination of weaknesses in the government's internal control system. In this case, there is a role for government internal auditors that are highly expected to create an effective and sustainable control system. This study aims to determine the effect of the role of APIP in implementing the Maturity of the SPIP at the Inspectorate Kab. South Solok.

This research is a quantitative. The population and sample in this research were all government internal supervisory apparatus at the Inspectorate Kab. South Solok. Data collection technique used is through a questionnaire. The analysis technique used in this research is descriptive statistical analysis. The instrument were tested using validity test, reliability test, and normality test. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis.

The results showed that the role of leadership, internal supervisors, consultants, and catalysts had a positive effect on the implementation of the maturity of SPIP. While the role of quality assurance has a negative effect on the implementation of the maturity of SPIP.

Keywords: role of apip, spip, leadership, internal supervisor, consultant, quality assurance, and catalyst

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan segala rahmat, keberkahan dan kasih sayang kepada penulis. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammada SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Pengaruh Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Solok Selatan)” guna untuk memebuhi salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelas sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibunda Lopiarni, S. Pd tercinta dan Ayahanda Joni Hendri, A. Ma. Pd yang telah menjadi orang tua terhebat penulis yang selalu sabar dan memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan agar tetap bertahan dalam kondisi apapun. Terimakasih atas kasih sayang, pengorbanan yang luar biasa, dan dukungan do'a yang selama ini diberikan, semoga ini semua bisa membuat Ibunda dan Ayahanda bangga.

Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan, petunjuk, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak DR. Drs. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si. Ak. CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1.
4. Ibu Aras Aira, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing Akademis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
5. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si. Ak. CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu selaku Staf dan Pegawai yang telah membantu penulis dalam mengurus segala surat yang diperlukan selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Bapak dan Ibu selaku Staf dan Pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Solok Selatan yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis dalam pengambilan data di Kantor Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.
9. Seluruh responden yang terdaftar di Kantor Inspektorat Kabupaten Solok Selatan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini.
10. Abang Yanformi Rendra Sulata dan Adik Ferdi Hendri Sulata. Terimakasih untuk segala do'a dan motivasi selama ini.
11. Seluruh teman-teman di kampus, terutama kelas Akuntansi B 2016 yang telah menjadi bagian hidup penulis yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, dan juga terimakasih untuk kelas Akuntansi Audit yang sama-sama berjuang selama perkuliahan demi kesuksesan bersama.
12. Terimakasih kepada sahabat satu kos Chika, Sherly Atika Hernis, dan Raja Aulia Pitaloka yang telah meluangkan waktu, tenaga dan harinya untuk mendengarkan dan ikut terlibat dalam suka duka dalam penulisan ini.
13. Terimakasih kepada sahabat Bukan Squad Crazy (BSC) Hikma, Irza, Ica, Lastri, Husna, Suci, Desinta, Nurhasanah, dan Melati yang telah memberikan bantuan serta meluangkan waktu, tenaga dan harinya untuk mendengarkan keluh kesah penulis selama penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman KKN Kuantan Singingi, Desa Lubuk Ramo, Staf dan Kepegawaian Desa Lubuk Ramo serta Masyarakat Desa Lubuk Ramo. Terimakasih atas pengalaman hidup, kasih sayang, cinta, cerita, dan ilmu yang dibagikan, terimakasih sudah menjadi keluarga baru untuk penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama prosen penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis, serta melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amiin yaa robbal ‘alamiin.

Pekanbaru, April 2020

Penulis

Desri Helen Utama
Nim. 11673201429

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	9
1. 3 Tujuan	10
1. 4 Manfaat	10
1. 5 Sistematika Penulisan.....	11

BAB II KAJIAN TEORI..... 13

2. 1 Kajian Teori.....	13
2. 1.1 Grand Theory	13
2. 1. 1. 1. Teori Agensi.....	13
2. 1. 1. 2. Teori Peran	17
2. 1. 1. 3. Teori <i>Stewardship</i>	20
2. 2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	21
2. 2. 1 Pengertian.....	21
2. 2. 2 Unsur- Unsur SPIP.....	23
2. 2. 3 Manfaat SPIP	26
2. 2. 4 Keterbatasan SPIP	26
2. 2. 5 Hambatan Penerapan SPIP	27
2. 2. 6 Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan SPIP	27
2. 3 Maturitas SPIP.....	27
2. 4 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).....	30
2. 5 Peran APIP dalam Pelaksanaan Maturitas SPIP.....	33
2. 5. 1. Peran Kepemimpinan.....	34
2. 5. 2. Peran Pengawasan Intern (<i>Watch dog</i>)	36

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. 5. 2. 1	Pengertian.....	36
2. 5. 2. 2	Fungsi dan Tugas Pengawasan Internal	36
2. 5. 3.	Konsultan (<i>consultant</i>).....	37
2. 5. 4.	Penjamin Mutu (<i>quality assurance</i>)	38
2. 5. 5.	Peran Katalisator	39
2. 6	Penelitian Terdahulu.....	39
2. 7	Pandangan Islam Tentang Peran APIP	41
2. 8	Kerangka Konseptual	42
2. 9	Pengembangan Hipotesis	44
BAB III METODE PENELITIAN		50
3. 1.	Lokasi Penelitian.....	50
3. 2.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
3. 3.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	50
3. 4.	Sumber dan Jenis Data	51
3. 5.	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3. 6.	Variabel Penelitian.....	52
3. 6. 1.	Variabel Dependen.....	52
3. 6. 2.	Variabel Independen.....	52
3. 7.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	52
3. 8.	Teknik Analisis Data	54
3. 8. 1.	Analisis Statistik Deskriptif	54
3. 8. 2.	Uji Kualitas Data.....	54
3. 8. 2. 1	Uji Reliabilitas	55
3. 8. 2. 2	Uji Validitas	55
3. 8. 3.	Uji Asumsi Klasik	55
3. 8. 3. 1	Uji Normalitas.....	56
3. 8. 3. 2	Uji Multikolineraritas.....	56
3. 8. 3. 3	Uji Heteroskedastisitas.....	57
3. 8. 3. 4	Analisis Regresi Linier Berganda	57
3. 8. 4.	Uji Hipotesis	58
3. 8. 4. 1.	Uji Signifikansi Variabel (Uji T).....	59
3. 8. 4. 2.	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	59
3. 8. 4. 3	Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	60

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 61

4. 1. Deskriptif Responden	61
4. 1. 1. Karakteristik Responden	62
4. 1. 1. 1. Umur	62
4. 1. 1. 2. Jenis Kelamin.....	63
4. 1. 1. 3. Pendidikan Terakhir	63
4. 1. 1. 4. Pengalaman Kerja.....	64
4. 2. Hasil Uji Data <i>Pre-Test</i>	65
4. 2. 1. Deskriptif Responden <i>Pre-Test</i>	65
4. 2. 2. Waktu Pengumpulan Data.....	65
4. 2. 3. Hasil Uji Kualitas Data <i>Pre-test</i>	65
4. 2. 3. 1. Hasil Uji Validitas <i>Pre-test</i>	65
4. 2. 3. 2. Hasil Uji Reliabilitas <i>Pre-Test</i>	70
4. 2. 3. 3. Hasil Uji Normalitas <i>Pre-Test</i>	70
4. 3. Hasil Statistik Deskriptif	72
4. 4. Hasil Uji Kualitas Data.....	76
4. 4. 1. Hasil Uji Validitas.....	76
4. 4. 2. Hasil Uji Reliabilitas.....	82
4. 5. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	83
4. 5. 1. Hasil Uji Normalitas	84
4. 5. 2. Hasil Uji Multikolineritas.....	85
4. 5. 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas	87
4. 6. Hasil Uji Hipotesis.....	88
4. 6. 1. Hasil Uji Parsial (Uji T)	92
4. 6. 2. Hasil Uji Simultan (Uji F).....	100
4. 6. 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	103

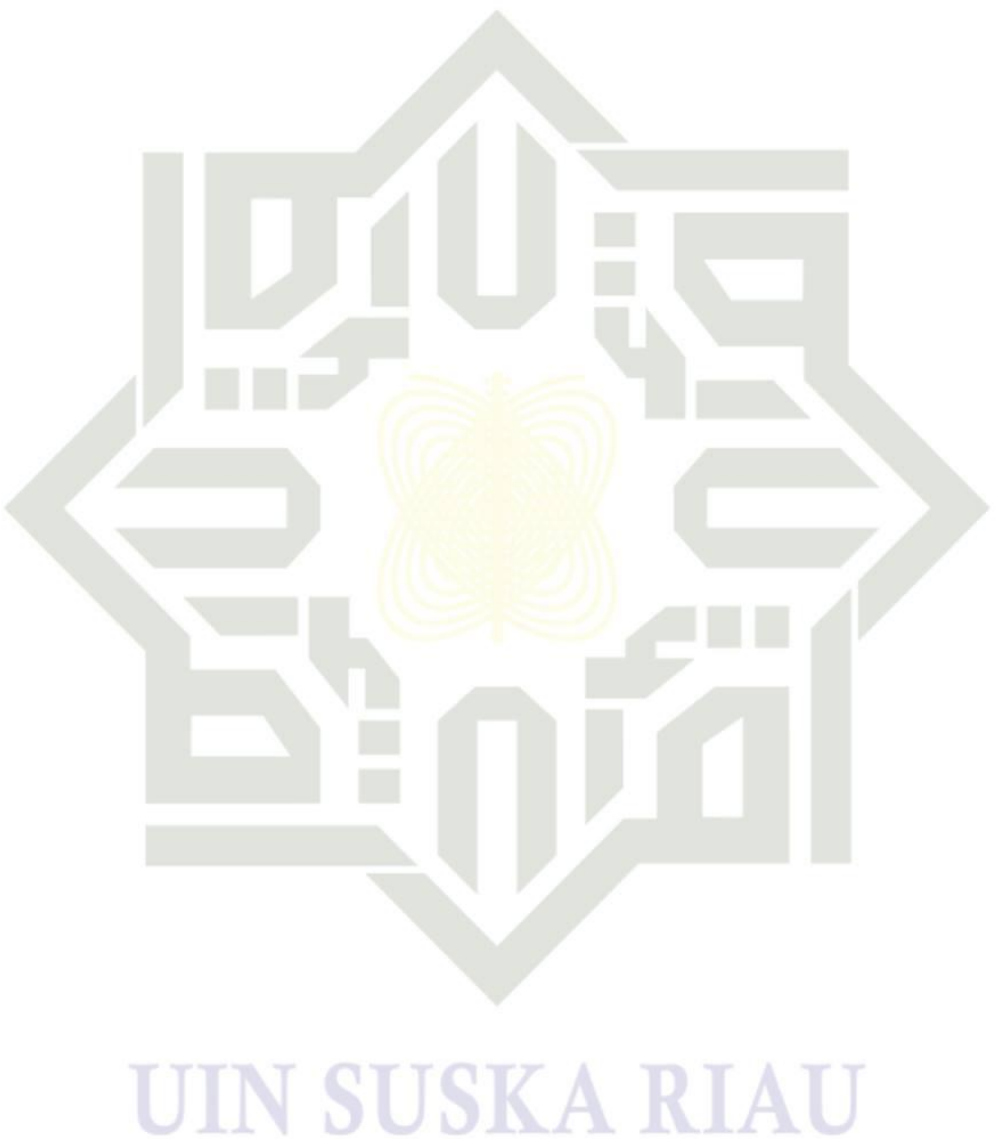
BAB V PENUTUP..... 105

5. 1. Kesimpulan	105
5. 2. Keterbatasan	108
5. 3. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP.....	29
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	52
Tabel 4. 1 Jumlah Sampel Responden Inspektorat	62
Tabel 4. 2 Data Distribusi Kuesioner	62
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	62
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	63
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja.....	64
Tabel 4. 7 Deskriptif Responden <i>Pre-Test</i>	64
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas <i>Pre-Test</i> Kepemimpinan (X_1)	66
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas <i>Pre-Test</i> Pengawas Internal (X_2).....	66
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas <i>Pre-Test</i> Konsultan (X_3).....	67
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas <i>Pre-Test</i> Penjamin Mutu (X_4)	68
Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas <i>Pre-Test</i> Katalisator (X_5)	68
Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas <i>Pre-Test</i> Pelaksanaan Maturitas SPIP (Y)	69
Tabel 4. 14 Hasil Uji Realibilitas <i>Pre-Test</i>	70
Tabel 4. 15 Hasil Uji Normalitas Pervariabel <i>Pre-Test</i>	71
Tabel 4. 16 Hasil Uji Normalitas Unstandardized <i>Pre-Test</i>	72
Tabel 4. 17 Statistik Deskriptif Variabel.....	73
Tabel 4. 18 Hasil Uji Validitas Kepemimpinan (X_1)	77
Tabel 4. 19 Hasil Uji Validitas Pengawas Internal (X_2)	78
Tabel 4. 20 Hasil Uji Validitas Konsultan (X_3)	79
Tabel 4. 21 Hasil Uji Validitas Penjamin Mutu (X_4).....	80
Tabel 4. 22 Hasil Uji Validitas Katalisator (X_5)	81
Tabel 4. 23 Hasil Uji Validitas Pelaksanaan Maturitas SPIP (Y)	82
Tabel 4. 24 Hasil Uji Realibilitas	83
Tabel 4. 25 Hasil Uji Normalitas Pervariabel	84
Tabel 4. 26 Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residuals.....	85
Tabel 4. 27 Hasil Uji Multikolinearitas.....	86
Tabel 4. 28 Hasil Uji Heteroskedastisitas	88
Tabel 4. 29 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	90
Tabel 4. 30 Hasil Uji T.....	93
Tabel 4. 31 Hasil Uji F.....	101
Tabel 4. 32 Hasil Uji Paling Berpengaruh Dominan	102
Tabel 4. 33 Hasil Uji Determinasi.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	43
---------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1). Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (*Cost and benefit*), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah. Penelitian Sardi (2016), memberikan bukti bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Kenyataannya, Sistem Pengendalian Intern di Indonesia rata-rata masih berada pada level berkembang sehingga belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan atas tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah tidak lepas dari peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (www.kemenkeu.go.id). Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih serta berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, peran fungsional APIP pun diperluas dengan diterbitkannya Peraturan MENPAN No.5 Tahun 2008, Peraturan MENPAN-RB No.19 Tahun 2009, dan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia, tentang perluasan tugas dan wewenang dari APIP yang semula sebagai auditor internal pemerintah diperluas menjadi konsultan manajemen untuk mengefisienkan penyelenggaraan pemerintah dan aparat pencegah serta pemberantasan korupsi di internal pemerintah (Novriansa dan Riyanto, 2016). Salah satu jenis pengawasan pemerintah daerah adalah pengawasan internal. Pengawasan internal ini dijalankan oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah (Trisnawati, 2018). Peran utama APIP adalah sebagai konsultan dan *problem solver* bagi pemerintah daerah dengan tugas melakukan pemeriksaan, review, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan lain terhadap



penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah (Matei dkk., 2017:90).

Pengawasan pemerintah daerah bermaksud untuk memastikan bahwa seluruh institusi yang melaksanakan fungsi publik benar-benar menjalankan kegiatannya secara efisien dan efektif. Kenyataannya, pengawasan internal masih menghadapi kendala di berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Aparat pengawasan belum cukup berintegritas dan memiliki kapabilitas, aparat pengawasan belum benar-benar independen, dan kebutuhan jumlah personel aparat pengawasan belum terpenuhi (Anonim, 2016a:1).

Permasalahan yang terjadi saat ini di lingkungan pemerintah di Indonesia berkaitan dengan kasus-kasus kecurangan seperti korupsi. Banyak pihak yang berpendapat salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah kelemahan sistem pengendalian intern. Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara juga menyampaikan “permasalahan tersebut adalah temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan” (gemamedianet.com). Kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, pemeriksa harus melakukan pengembangan prosedur audit dan mengungkapkannya dalam LHP. Tindakan pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian (BPKP, 2013). Selain itu, Ketua Umum Badan Pengurus Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Drs TB Rahmad Sukendar, menganggap, salah satu penyebab maraknya kecurangan keuangan daerah adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lemahnya Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat. Intinya, kata dia, Inspektorat adalah Instansi Daerah yang menyebar pemerintahan Daerah (Pemda) dan Desa, sekaligus mencegah pemulihan sejak dini. “Inspektorat Daerah selama ini dan sengaja tidak memperkuat pengawasan dan praktik terhadap korupsi di daerah. Ini mendorong maraknya kasus korupsi keuangan daerah dan bergulir Dana Desa oleh Oknum Kades,” kata Rahmad (kulitinta.id).

Fenomena mengenai masih lemahnya pengawasan inspektorat, terjadi di Aceh Tenggara yaitu salah satu anggota DPRK Aceh Tenggara menilai auditor Inspektorat masih lemah dalam mengawasi penggunaan anggaran, mulai dari pemkab, kecamatan sampai pedesaan. Bahkan, dana desa yang mencapai ratusan juta rupiah diduga diselewengkan atau juga hanya melibatkan beberapa orang yang dekat dengan kepala desa, kepala inspektur Aceh Tenggara, Sanudin kemarin mengaku tim auditor terbatas, hanya berjumlah 18 orang, yang seharusnya 48 orang atau lebih. Masyarakat meminta bupati untuk menambah tenaga auditor, bahkan dapat memanfaatkan tenaga kontrak yang memiliki kemampuan dalam bidang auditor, para auditor harus bekerja profesional, karena jika tidak akan berdampak runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan internal (aceh.tribunnews.com). Berdasarkan fenomena tersebut, pada kasus Inspektorat Kota Aceh, dalam pengawasan peran auditor internal mengelola aktivitas audit internal tidak terpenuhi, karena Sumber daya audit internal tidak sesuai, tidak memadai dan tidak dapat digunakan secara efektif.

Selain itu terkait kelemahan sistem pengendalian, BPK mengungkapkan 9.808 temuan yang memuat 15.773 permasalahan meliputi 7.539 permasalahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelemahan sistem pengendalian internal dan 8.030 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp10,06 triliun (kompas.com).

Kabupaten Solok Selatan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan Pemerintah Daerah. Namun BPK masih menemukan permasalahan (temuan) audit baik itu audit atas laporan keuangan, audit sistem pengendalian internal dan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari hasil pemeriksaan BPK Tahun 2017 pada pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa penerapan SPIP pada Pemda Solok Selatan belum diterapkan secara maksimal. Terdapat temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:

1. Pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tidak sesuai petunjuk pelaksanaan.
2. Kesalahan penganggaran Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan
3. Penatausahaan dan Pemakaian Aset Tetap belum sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah (padang.bpk.go.id).

Dari temuan kelemahan sistem pengendalian internal oleh BPK di atas, bisa disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di Kab. Solok Selatan masih lemah atau belum maksimal. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan SPIP, dilakukan penilaian maturitas (kematangan) implementasi SPIP. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Pengukuran tingkat maturitas SPIP menunjukkan kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Satuan ukur dari pengukuran maturitas sistem pengendalian intern adalah level maturitas. Level tersebut ditentukan dengan membuat skala dari level 0 sampai level 5. Selain sebagai alat ukur, pelevelan ini nantinya dapat menjadi sarana organisasi merancang rencana tindak (*action plan*) untuk melakukan perbaikan berkelanjutan menuju level yang lebih tinggi.

Mulai tahun 2016 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disibukkan lagi dengan pekerjaan baru yaitu menilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada instansinya masing-masing. Rupanya kesibukan ini muncul dipicu oleh target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indikator kinerja berupa "tingkat kematangan implementasi SPIP" ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019 (RPJMN 2015-2019 Buku II). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP telah menyiapkan pedomannya. Pedoman ini ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (klikharso.com).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat melakukan penilaian Maturitas di Kabupaten Solok Selatan yang menunjukkan Solok Selatan berada pada level 2 (berkembang) (inspektorat.sumbarprov.go.id). Artinya Kabupaten Solok Selatan harus melakukan upaya lebih keras lagi untuk meningkat dari level 2 (berkembang) ke level 3 (terdefinisi). Dalam hal ini peran inspektorat sangat dibutuhkan, karena inspektoratlah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan maturitas SPIP.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Angel (2017) dimana peran Inspektorat dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi (1) kepemimpinan, dimana inspektorat sebagai pembina pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten, (2) pengawasan intern, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai fungsi Pengawasan Intern yang mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjamin kualitas yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta bersih dari praktek KKN, (3) konsultan (*consultant*), Inspektorat Kabupaten membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada semua SKPD yang ingin melakukan konsultasi terkait dengan masalah-masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat SKPD sampai tingkat desa, khususnya lagi konsultasi pertanggungjawaban dana desa, (4) penjamin mutu (*quality assurance*), dalam setiap pelaksanaan audit diharapkan mampu mengidentifikasi risiko dan mendorong proses perbaikan yang berkelanjutan, mendorong APIP Inspektorat Kabupaten untuk melaksanakan salah satu perannya sebagai penjamin mutu. Kemudian penambahan variabel katalisator dari penelitian Arfiani dkk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2020), yang menyatakan fungsi Inspektorat sebagai katalisator, Inspektorat akan ikut berperan mulai dari penentuan tujuan yang hendak dicapai sampai dengan menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Beberapa penelitian tentang penerapan SPI sudah pernah dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Zumriyatun Laila (2010) pada dua Pemda di Sumatera Barat, menemukan bahwa penerapan SPIP di Kabupaten Tanah Datar maupun Kabupaten Pasaman berada pada level sedang karena masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan SPIP. Widya Pratiwi (2012) menemukan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Bungo berada pada level cukup. Dalam penelitian Fitrianty (2017), belum tercapainya target level 3 (tiga) maturitas SPIP di Kabupaten Gorontalo mengindikasikan bahwa penerapan SPIP masih mengalami banyak kendala. Kendala-kendala dalam penerapan SPIP yaitu kompetensi SDM belum memadai, kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, terbatasnya anggaran, kurangnya kepatuhan, belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi, dan terdapat kegiatan yang belum didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan SPIP yaitu: 1) program pengembangan SDM melalui diklat substantif dan pelatihan kantor sendiri, 2) memaksimalkan anggaran, 3) membangun komunikasi yang efektif, 4) menambah jumlah auditor dan 5) membangun komitmen organisasi.

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Peran Aparat Pengawas Intern (APIP) dalam Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah yaitu:

1. Apakah Peran Kepemimpinan APIP berpengaruh secara parsial terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP pada Kabupaten Solok Selatan?
2. Apakah Peran Pengawas Internal (*watchdog*) APIP berpengaruh secara parsial terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP pada Kabupaten Solok Selatan?
3. Apakah Peran Konsultan (*consultant*) APIP berpengaruh secara parsial terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP pada Kabupaten Solok Selatan?
4. Apakah Peran Penjamin Mutu (*quality assurance*) APIP berpengaruh secara parsial terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP pada Kabupaten Solok Selatan?
5. Apakah Peran Katalisator APIP berpengaruh secara parsial terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP pada Kabupaten Solok Selatan?
6. Apakah Peran Kepemimpinan, Pengawasan Intern, Konsultan (*consultant*), Penjamin Mutu (*quality assurance*), dan Katalisator APIP berpengaruh secara simultan terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP pada Kabupaten Solok Selatan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.3. Tujuan

1. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Peran Kepemimpinan APIP terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP pada Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Peran Pengawas Internal (*watchdog*) APIP terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP pada Kabupaten Solok Selatan.
3. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Peran Konsultan (*consultant*) APIP terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP pada Kabupaten Solok Selatan.
4. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Peran Penjamin Mutu (*quality assurance*) APIP terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP pada Kabupaten Solok Selatan.
5. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Peran Katalisator APIP terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP pada Kabupaten Solok Selatan.
6. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Peran Kepemimpinan, Pengawasan Intern, Konsultan (*consultant*), Penjamin Mutu (*quality assurance*), dan Katalisator APIP terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP pada Kabupaten Solok Selatan.

1.4. Manfaat

1. Bagi pemerintah daerah, dapat memberikan motivasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan kualitas dan kinerja atas tata kelola pemerintahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Bagi Instansi, dapat memberikan motivasi agar bisa lebih meningkatkan efektivitas perannya dalam pengawasan.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pengawasan yang telah dilakukan atas pengendalian internal oleh pemerintah daerah.
4. Bagi akademis dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi sebagai penambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan konsep yang mendukung penelitian penulis tentang peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Pelaksanaan Maturitas SPIP.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek, objek, teknik pengumpulan data, variabel penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil analisa data beserta pembahasannya yang diperoleh dari pengolahan data dengan

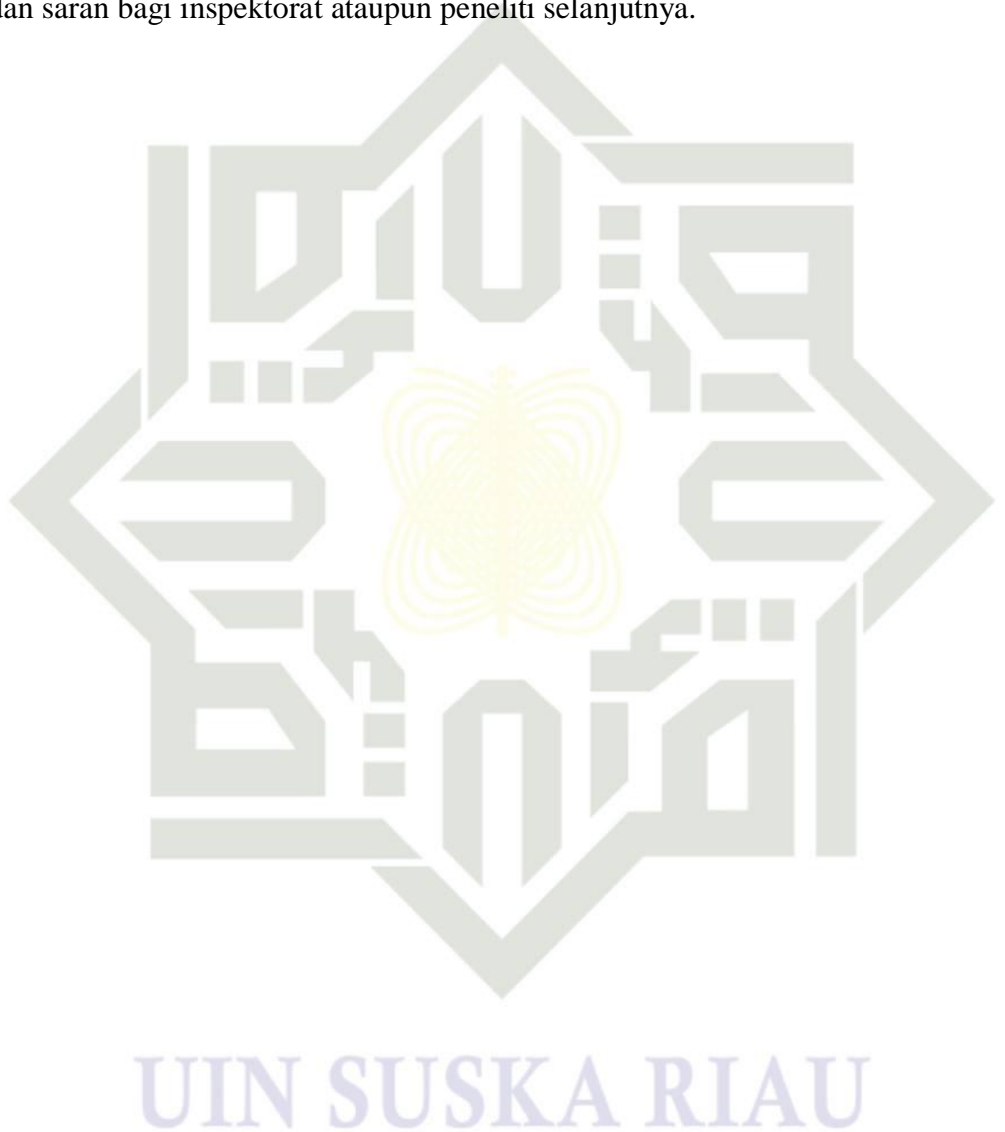
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode dan teknik yang sesuai dengan teori yang telah ada.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran bagi inspektorat ataupun peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Grand Theory

2.1.1.1. Teori Agensi

Dalam hubungan ini terjadi perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* dan adanya perbedaan informasi yang dimiliki serta tujuan dan pilihan risiko terkait usaha yang dilakukan antara *agent* dengan *principal* sehingga dapat menimbulkan konflik diantara keduanya (Aikins, 2012). Konflik akan terus meningkat karena *principal* tidak dapat mengawasi aktivitas *agent* sehari-hari untuk memastikan bahwa *agent* telah bekerja sesuai dengan keinginan dari *principal* sehingga berdampak pada timbulnya asimetri informasi (Latifah, 2010).

Masyarakat sebagai *principal* memiliki hak menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut sebagai *agent* dan diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat agar mampu memenuhi harapan masyarakat. Dua sisi yang berbeda ini seringkali menimbulkan konflik. Apalagi masyarakat kebanyakan tidak puas dengan hasil kinerja pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian untuk mengatur perbedaan dua kepentingan tersebut yang sangat menentukan pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Teori keagenan yang kita ketahui bersama menempatkan auditor, dalam pengertian luas, pada tempat yang strategis. Auditor ada untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan jaminan terhadap pencapaian tujuan prinsipal yang dititipkan pada agen akan terlaksana dengan baik. Keputusan-keputusan prinsipal, akan diwarnai dengan sangat tebal oleh saran-saran dari auditor. Tingkat kepercayaan prinsipal kepada agen, ditentukan oleh sejauh mana auditor dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Untuk mendapatkan saran yang paling tinggi derajatnya, dalam hal ini prinsipal membutuhkan entitas yang merdeka, atau independen dari segala kepentingan. Independensi tersebut dipercaya akan mengarahkan kepada objektivitas saran auditor yang akan menambah nilai suatu organisasi (Bayhi, 2012).

Auditor berperan sebagai penengah kedua belah pihak (*agent* dan *principal*) yang berbeda kepentingan dalam mengelola keuangan perusahaan. Tugas dari auditor diantaranya adalah memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Dengan diaudit oleh auditor yang independen, *agent* dapat membuktikan bahwa kepercayaan *principal* tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi agent (Saputri, 2018). Penerapan *good governance* oleh pemerintah dan memaksimalkan efektivitas peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal pemerintah menjadi mekanisme yang penting untuk pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat (*principal*).

2.1.1.1. Peran Kepemimpinan terhadap pelaksanaan Maturitas SPIP

Dalam menjalankan perannya sebagai pembina pelaksanaan SPIP di pemerintah daerah, APIP sebagai pemimpin mengarahkan dan mempengaruhi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

setiap OPD (*agent*) agar selalu meningkatkan pelaksanaan SPIP. Apabila APIP telah berhasil mengarahkan setiap OPD dalam pelaksanaan SPIP, maka dapat mewujudkan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sehingga tidak terjadi kesalahan atau kecurangan. Dan APIP mampu memberikan keyakinan masyarakat (*principal*) bahwa instansi (*agent*) telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2.1.1.1.2. Peran Pengawasan Internal (*watchdog*) terhadap pelaksanaan Maturitas SPIP

APIP mengawasi setiap instansi pemerintah daerah apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Melalui pengawasan yang baik APIP dapat menilai pelaksanaan SPIP pada setiap instansi. Dengan pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP, dapat mengurangi tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan pribadi. Jika APIP telah melaksanakan peran pengawasannya dengan baik akan berdampak pada pemerintahan yang bersih dari tindakan menyimpang. Sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat (*principal*) kepada instansi pemerintah (*principal*) bahwa pengelolaan pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2.1.1.1.3. Peran Konsultan (*consultant*) terhadap pelaksanaan Maturitas SPIP

APIP sebagai konsultan diharapkan mampu memberikan manfaat berupa saran untuk perbaikan dan ikut berpartisipasi membantu instansi melakukan berbagai tindakan perbaikan tersebut. Dengan saran perbaikan yang diberikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh APIP dapat mendukung adanya pelaksanaan SPIP yang baik pada setiap OPD. Sehingga sebagai konsultan, APIP dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat (*principal*) bahwa setiap OPD (*agent*) telah menjalankan setiap kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2.1.1.1.4. Peran Penjamin Mutu (*quality Assurance*) terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP

Inspektorat sebagai penjamin mutu yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks pelaksanaan SPIP, APIP menjamin bahwa setiap OPD telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan SPIP. Dengan demikian, sebagai penjamin mutu APIP dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat (*principle*) bahwa setiap OPD (*agent*) telah menjalankan tugasnya dengan baik.

2.1.1.1.5. Peran Katalisator terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP

Sebagai katalisator APIP melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang mendorong kearah yang lebih baik, sehingga akan membantu efektivitas pelaksanaan SPIP organisasi tersebut. Dengan pelaksanaan SPIP yang efektif akan mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Sehingga APIP dalam meyakinkan *principle* bahwa setiap OPD telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.1.2. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu dia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dialogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi (Sarwono, 2015).

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking.*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”(Mukmin, 2014).

Inspektorat merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, memainkan peranan yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran dan fungsi Inspektorat antara lain sebagai mitra kerja pemerintah daerah untuk memudahkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di unit kerja masing-masing agar dapat mencapai tujuan dan sasaran kegiatan operasionalnya dengan efektif dan efisien (Angel, 2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.1.1.2.1 Peran Kepemimpinan Terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP

APIP sebagai *leader* diharapkan mampu menjalankan perannya dengan memotivasi dan mengarahkan setiap OPD dalam pelaksanaan SPIP. Sehingga dengan arahan dari APIP, setiap OPD diharapkan dapat mampu meningkatkan kesempurnaan pelaksanaan SPIP-nya. Dengan peran yang dijalankan oleh APIP akan berpengaruh terhadap keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.1.2.2 Peran Pengawas Internal (*watchdog*) Terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP

APIP memiliki peran sebagai *watchdog* yang mengawasi kepatuhan setiap OPD terkait pelaksanaan SPIP. Melalui pengawasan yang efektif, pemerintah dapat menilai apakah kebijakan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh APIP diharapkan dapat mendukung kematangan pelaksanaan SPIP. Dengan pengawasan yang efektif, APIP dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dari tindakan-tindakan kecurangan.

2.1.1.2.3 Peran Konsultan (*consultan*) Terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP

APIP menjalankan perannya sebagai konsultan yaitu menggali informasi dari auditan untuk mencari penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan. Serta membuka kesempatan bagi OPD untuk berkonsultasi dan memberikan saran-saran terkait aktivitas organisasi yang dapat mendukung proses tata kelola

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

organisasi. Dengan perannya sebagai konsultan, APIP diharapkan dapat membimbing setiap OPD terkait efektivitas pelaksanaan SPIP.

2.1.1.2.4 Peran Penjamin Mutu (*quality assurance*) Terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP

Peran APIP sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) maka pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP, bukanlah upaya untuk mengungkapkan kesalahan dan menjatuhkan OPD. Pengawasan justru berfungsi untuk membantu OPD agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada setiap OPD senantiasa berada pada jalur yang benar dan mendorong proses perbaikan yang berkelanjutan. Sehingga melalui peran penjamin mutu yang dilaksanakan oleh APIP diharapkan dapat membawa setiap OPD dalam upaya pelaksanaan SPIP.

2.1.1.2.5 Peran Katalisator Terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP

APIP saat ini diharapkan berperan sebagai katalis yang bisa mendampingi OPD dalam mengenali resiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan akan ikut bertugas serta bekerjasama dengan manajemen dalam penentuan tujuan dari suatu organisasi yang berdampak untuk jangka panjang. Sebagai katalisator, APIP berperan mendampingi OPD dalam pelaksanaan SPIP organisasi tersebut. Dengan perannya sebagai katalisator, APIP dapat menjadi *partner* bagi OPD yang membantu organisasi dengan bekerjasama dalam pencapaian tujuan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.1.3. Teori *Stewardship*

Berdasarkan teori *stewardship* manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1989,1991, dalam Juniarso, 2015). Dalam teori *steward* yaitu *stewardship* memiliki tujuan yang sama dengan *principal*. APIP berperan sebagai *steward* bagi prinsipal. Kewajiban APIP sebagai *steward* bagi prinsipal terletak pada tugas-tugas audit yang dijalankan. Tugas APIP sebagai auditor internal sangat penting bagi kepuasan masyarakat, karena tugas-tugas tersebut memiliki hubungan dengan kasus-kasus korupsi yang juga merugikan masyarakat (Juniarso, 2015). Teori *stewardship* juga menjelaskan bahwa *steward* mempunyai pandangan/tujuan yang sama dengan prinsipal atau lebih mementingkan tujuan organisasi dibandingkan dengan tujuan pribadinya (Ningsih, 2019). Implikasi Teori *Stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi auditor internal sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Tugas dan fungsinya berupa membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanatkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka auditor internal mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas (Haliah, 2013: 24).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan demikian, dalam teori *stewardship* inspektorat berperan sebagai organisasi pengawas yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan melaksanakan tugas sebagai aparat pengawas internal pemerintah yang efektif, maka akan mewujudkan peningkatan *good governance* (Mailoor, 2017).

2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2.2.1 Pengertian

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 Tahun 2008).

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008). Dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam Mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. (UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2).

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan,
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Didalam PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 11, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP Pasal 47 PP No. 60 Tahun 2008 yaitu;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
2. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
 - b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

2. 2. 2 Unsur- Unsur SPIP

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur dan 25 (dua puluh lima) sub unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) Penegakan Integritas dan Etika
- b) Komitmen terhadap Kompetensi
- c) Kepemimpinan yang Kondusif
- d) Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
- e) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
- f) Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
- g) Peran APIP yang Efektif
- h) Hubungan Kerja yang Baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Dalam penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko terdiri dari:

- a) Identifikasi Risiko, dengan menggunakan berbagai metodologi yang sesuai untuk tujuan IP dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif, mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko yang dihadapi instansi pemerintah.
- b) Analisis Risiko, dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan IP menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan IP dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang perlu, telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam mencapai tujuan. Kegiatan pengendalian terdiri atas :

- a) Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b) Pembinaan Sumber Daya Manusia
- c) Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
- d) Pengendalian Fisik atas Aset
- e) Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
- f) Pemisahan Fungsi
- g) Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
- h) Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
- i) Pembatasan Akses atas Sumber Daya
- j) Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
- k) Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi terdiri atas :

- a) Sarana Komunikasi
- b) Sistem Informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan Pengendalian Intern yaitu proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

- a) Pemantauan Berkelanjutan
- b) Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut.

2. 2. 3 Manfaat SPIP

1. Memberikan jaminan bahwa operasi/kegiatan Instansi menjadi efektif, efisien dan ekonomis,
2. Mendeteksi terjadinya kesalahan (mismanagement) dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi,
3. Membantu pengamanan asset terkait terjadinya fraud, pemborosan, dan salah penggunaan yang tidak sesuai tujuan,
4. Memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan,
5. Memberi keyakinan akan ketaatan terhadap peraturan perundangan,
6. Membantu manajemen merespon perubahan.

2. 2. 4 Keterbatasan SPIP

1. Praktek kolusi sehingga Sistem Pengendalian Intern tidak efektif;
2. Pimpinan Instansi Pemerintah mengabaikan pentingnya Sistem Pengendalian Intern;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. *Human error*; pengambilan keputusan yg tidak tepat mengakibatkan kegagalan pengendalian (kegagalan personal).

2. 2. 5 Hambatan Penerapan SPIP

1. Persepsi pimpinan Instansi Pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai;
2. Budaya sungkan yang masih kental;
3. Kualifikasi SDM yang kurang memadai.

2. 2. 6 Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan SPIP

1. Terdapat kesadaran dan kepedulian di seluruh tingkatan jajaran manajemen dan staff,
2. Terdapat kesamaan persepsi atas tanggungjawab efektivitas SPIP,
3. Terdapat SPIP yang sesuai dengan kebutuhan organisasi,
4. Pengembangan secara berkesinambungan.

2. 2. 3 Maturitas SPIP

Maturitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kematangan atau kedewasaan. Menurut IIA (2013) Model maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik. Maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam mencapai tujuan, sedangkan tingkat maturitas yang lebih tinggi mencerminkan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan PP 60 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2) huruf b serta pasal 59 ayat (1) dan (2).

Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: “Belum Ada”, “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, “Optimum”. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai sifat dasar masing-masing yang dapat secara nyata membedakan satu tingkat dari lainnya.

Penjelasan karakteristik tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dijelaskan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Tingkat	Karakteristik SPIP
0 (Belum Ada)	K/L/P sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
1 (Rintisan)	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
2 (Berkembang)	K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
3 (Terdefinisi)	K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4 (Terkelola dan Terstruktur)	K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/P. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5 (Optimum)	K/L/P telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Sumber: Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016

Fokus penilaian maturitas SPIP merupakan variabel yang digunakan untuk menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Variabel tersebut merupakan sub-sub unsur SPIP di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Secara keseluruhan terdapat lima fokus penilaian yang tersebar ke dalam 25 sub unsur SPIP.

2.4 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); inspektorat jenderal kementerian,
- b. Inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian negara, inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga negara;
- c. Inspektorat provinsi/kabupaten/kota; dan
- d. Unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Reformasi pengelolaan keuangan negara turut memperkuat eksistensi APIP, terutama terkait perannya dalam mendukung penguatan sistem pengendalian intern instansi pemerintah. Di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan intern oleh APIP (pasal 47 dan 48). Dengan demikian pekerjaan utama APIP berdasarkan konsep PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah melakukan pengawasan intern. Pengawasan Intern didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dari definisi tersebut dapat dijabarkan bentuk pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP, yaitu:

- a. Audit, meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- b. Reviu, meliputi penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- c. Evaluasi, meliputi rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- d. Pemantauan, meliputi proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan

pengawasan lainnya: antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Selain itu Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain;

1. Di dalam Instansi Pemerintah, terdapat mekanisme untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
 - a. Aparat pengawasan intern pemerintah, yang independen, melakukan pengawasan atas kegiatan Instansi Pemerintah.
 - b. Aparat pengawasan intern pemerintah membuat laporan hasil pengawasan setelah melaksanakan tugas pengawasan.
 - c. Untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
2. Di dalam Instansi Pemerintah terdapat mekanisme peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
3. Di dalam Instansi Pemerintah, terdapat upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (*good governance*) tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan sehingga tercipta mekanisme saling uji. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a. Instansi Pemerintah memiliki hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, serta melakukan pembahasan secara berkala tentang pelaporan keuangan dan anggaran, pengendalian intern serta kinerja.
- b. Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah yang melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang bersifat lintas instansi.

2. 5 Peran APIP dalam Pelaksanaan Maturitas SPIP

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 mengamanatkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Intern perlu dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat Kabupaten. Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 59 maka Inspektorat Kabupaten Solok Selatan hendaknya melakukan;

- a) Penyusunan program teknis penyelenggaraan SPIP,
- b) Sosialisasi SPIP,
- c) Pendidikan dan pelatihan SPIP,
- d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan
- e) Peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian Angel (2017), yang mengemukakan peran Inspektorat dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari kepemimpinan, pengawasan intern, konsultan, dan penjamin mutu. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel peran Apip sebagai katalisator.

2.5. 1. Peran Kepemimpinan

Menurut Rivai dan Mulyadi (2011) kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Seorang pimpinan (*principal*) berkewajiban memberikan motivasi kepada bawahan (*agent*) yang dibawahinya agar mereka tetap melaksanakan tugas dengan baik, memiliki dedikasi terhadap organisasi dan tetap merasa

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

berkewajiban untuk mencapai tujuan organisasi (Wati *et al.*, 2010).

Kepemimpinan merupakan faktor terpenting dalam suatu organisasi.

Menurut Kadarusman (2012) kepemimpinan (*Leadership*) dibagi tiga, yaitu:

1) *Self Leadership*.

Self Leadership yang dimaksud adalah memimpin diri sendiri agar jangan sampai gagal menjalani hidup.

2) *Team Leadership*

Team Leadership diartikan sebagai memimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah team leader (pemimpin kelompok) yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya, menyelami kondisi bawahannya, kesediaannya untuk meleburkan diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikulnya, serta memiliki komitmen untuk membawa setiap bawahannya mengeksplorasi kapasitas dirinya hingga menghasilkan prestasi tertinggi.

3) *Organizational Leadership*

organizational leadership dilihat dalam konteks suatu organisasi yang dipimpin oleh organizational leader (pemimpin organisasi) yang mampu memahami nafas bisnis perusahaan yang dipimpinnya, membangun visi dan misi pengembangan bisnisnya, kesediaan untuk melebur dengan tuntutan dan konsekuensi tanggung jawab sosial, serta komitmen yang tinggi untuk menjadikan perusahaan yang dipimpinnya sebagai pembawa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkah bagi komunitas baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

2.5.2. Peran Pengawasan Intern (*Watch dog*)

2.5.2.1 Pengertian

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2011 pasal 1, pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.2.2 Fungsi dan Tugas Pengawasan Internal

Fungsi pengawasan dalam membantu manajemen meliputi tiga hal, yaitu: (1) meningkatkan kinerja organisasi, (2) memberikan opini atas kinerja organisasi dan (3) mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah pencapaian kinerja yang ada. Fungsi ini dilakukan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen secara cepat dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggara, baik secara internal maupun eksternal (Widanarto, 2012).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 47 Tahun 2011 Pasal 4 tentang Satuan Pengawasan Intern di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Langkungan Kementerian Pendidikan Nasional bahwasannya fungsi Pengawasan Internal adalah:

- a) Penyusunan Program Pengawasan
- b) Pengawasan kebijakan dan program
- c) Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang milik negara
- d) Pendampingan dan review laporan keuangan
- e) Pemberian saran dan rekomendasi
- f) Penyusunan laporan pengawasan
- g) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.

2. 5. 3. Konsultan (*consultant*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsultan berarti ahli yang tugasnya memberi petunjuk, pertimbangan, atau nasihat dalam suatu kegiatan (penelitian, dagang, dsb) penasihat.

Sebagai konsultan (*consultant*), peran dari auditor internal adalah memberikan saran untuk perbaikan dan ikut berpartisipasi secara aktif membantu manajemen melakukan berbagai tindakan perbaikan, sehingga lebih berperan sebagai mitra bagi pihak manajemen dan auditee. Skop dari pekerjaan auditor internal adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan telah berjalan secara efektif, efisien, dan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis. Fokus utama dari auditor internal adalah melakukan konservasi terhadap sumber daya organisasi sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi dan membantu pihak manajemen dalam mengelola organisasinya. Sebagai konsultan, auditor internal harus secara aktif bertindak

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai fasilitator pihak auditee dalam rangka mendiskusikan *the best possible choice* untuk pemecahan masalah yang dihadapi auditee, dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisien, efektif, dan ekonomis dalam penggunaan sumber daya perusahaan.

2.5.4. Penjamin Mutu (*quality assurance*)

Menurut Fattah (2013:12) menyatakan penjaminan mutu (*quality assurance*) adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian (*review*) mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses, dan komponen produk sesuai dengan yang diharapkan oleh stakeholders.

Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang absolut, misalnya sekolah yang mahal dan mewah. Sebagai sesuatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar. sesuatu yang bermutu merupakan bagian standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli.

Peran auditor internal sebagai penjamin (*assurance*) adalah auditor internal memberikan jaminan dan memastikan bahwa aktivitas perusahaan telah berjalan sebagaimana mestinya menurut peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan baik perusahaan maupun pemerintah (Brifana, 2016).

2.5.5. Peran Katalisator

Fungsi katalisator untuk memberikan jasa manajemen dan saran-saran yang bersifat konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan organisasi. Peran sebagai katalisator lebih fokus menetralsir semua risiko-risiko yang mengancam organisasi dalam waktu jangka panjang (Arfiani, dkk, 2020). Peran auditor internal sebagai katalisator yaitu memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan namun tidak ikut dalam aktivitas operasional perusahaan.

Sebagai katalisator, auditor internal memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh bagian dari organisasi dalam cakupan seperangkat kebijakan yang telah dibuat oleh manajer senior serta memastikan tidak terjadi pelanggaran atau bertentangan dengan segala aturan atau kebijakan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi katalis ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan pengaruh jangka panjang pada organisasi dengan memfokuskan diri pada nilai-nilai jangka panjang dari organisasi auditee. Peran katalis ini membutuhkan komitmen dari auditee dan auditor internal, karena pembentukan nilai, moral, dan budaya organisasi tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek.

2.5.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan guna menguji pengaruh variabel-variabel yang memengaruhi pelaksanaan SPIP telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Th)	Judul	Metode/ Variabel	Hasil
1	Angel Wulandari Manialup, Grace B. Nangoi, dan Jenny Morasa (2017)	Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Inspektorat dalam pelaksanaan SPIP di Kab. Kepulauan Talaud yaitu dalam hal kepemimpinan, pengawasan intern, konsultan dan penjamin mutu. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala penerapan SPIP di Kab. Talaud.
2	Fitrianti P., Jullie J. Sondakh, dan Jenny Morasa (2017)	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Kabupaten Gorontalo	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan SPIP pada Kab. Gorontalo telah sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Namun, belum tercapainya target level 3 maturitas SPIP di Kab. Gorontalo mengindikasikan bahwa penerapan SPIP masih mengalami banyak kendala.
3	Maya Sari (2015)	Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara	Metode Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan Sistem pengendalian intern pemerintah dianggap baik. BPKP sebagai pembina SPIP telah melaksanakan fungsinya dengan memadai, tetapi belum efektif dilihat capaian yang belum semua mencapai target, BPKP hanya sebagai pembina SPIP bukan sebagai pelaksana, yang menjadi pelaksana adalah pemerintah kabupaten/kota.

Sumber: Kumpulan Penelitian Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pandangan Islam Tentang Peran APIP

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujurat [49]:

6) Fungsi audit dilakukan berdasarkan pada sikap ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan oleh perusahaan mengandung informasi yang tidak benar yang dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kemampuan akses terhadap sumber informasi. Dalam fungsi ini disebut sebagai “tabayyun” atau mengecek kebenaran berita yang disampaikan dari sumber yang kurang dipercaya sebagaimana dinyatakan dalam Al Hujuraat (49) ayat 6. Seorang auditor memiliki kewajiban untuk menyaksikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah benar atau tidak.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS An-Nahl [16]: 90)

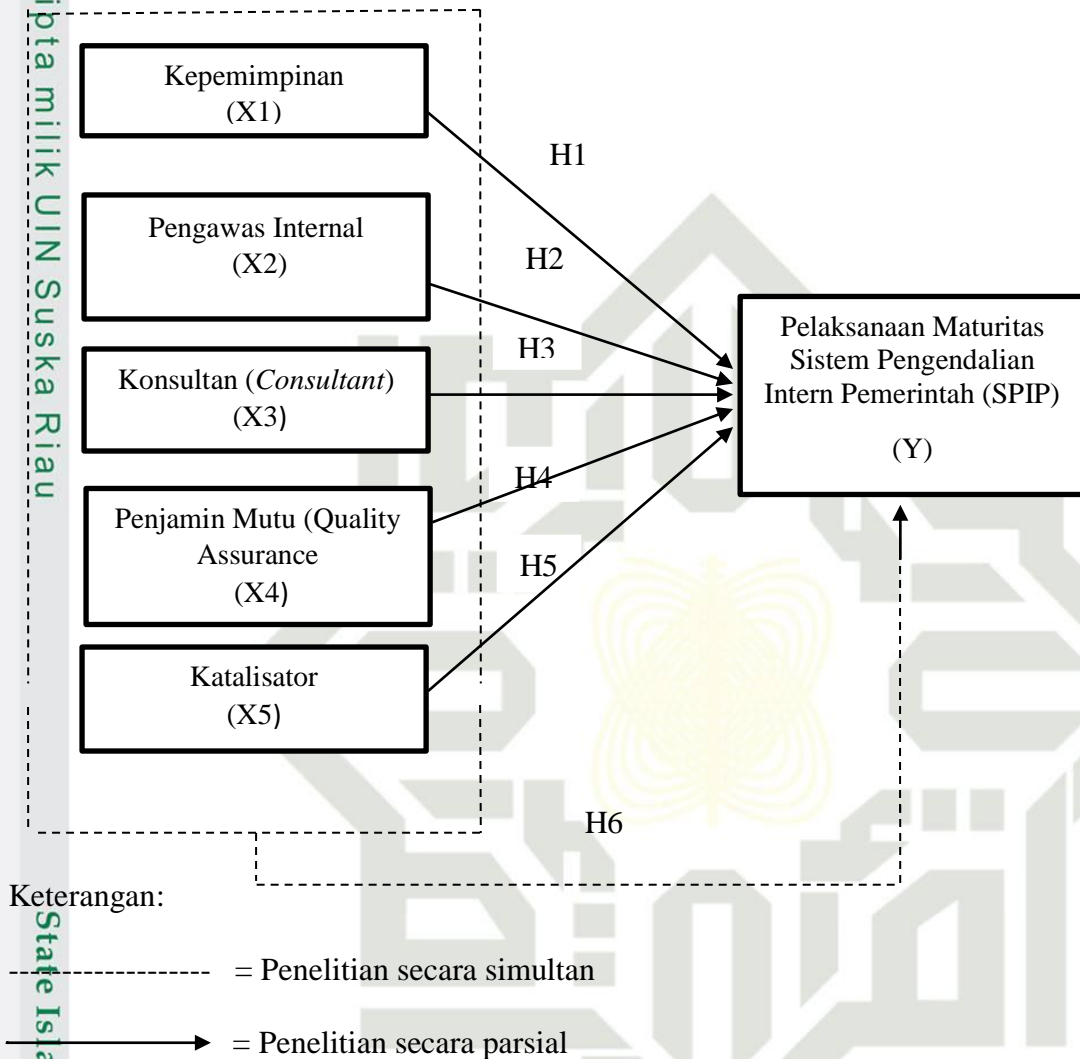
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel-variabel dalam penelitian ini. Maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut

Gambar 2.1
Skema Kerangka Konseptual



Sumber: Jurnal Angel, dkk., 2017 dan data olahan penulis 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengembangan Hipotesis

2.1. Pengaruh Peran Kepemimpinan APIP terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP

Fahmi (2013) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan.

Untuk menjalankan amanatnya sebagai pembina pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten, Inspektorat melakukan perannya sebagai *leader* yang merupakan corong terdepan dengan cara melakukan koordinasi, melakukan fungsi kontrol, mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, memberi saran terhadap kinerja dan manajemen risiko, sebagai penopang, sebagai wasit yang menilai tatanan pelaksanaan SPIP di tingkat SKPD dimana ketika dalam pelaksanaan terdapat kendala atau permasalahan, Inspektorat dapat memberikan solusi berupa rekomendasi untuk perbaikan ke depan (Angel, 2017).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan kepemimpinan yang baik, inspektorat sebagai APIP dapat mengarahkan dan mengawasi setiap instansi dalam pelaksanaan maturitas SPIP. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : Peran kepemimpinan APIP berpengaruh terhadap pelaksanaan Maturitas SPIP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.9.2. Pengaruh Peran Pengawasan Internal (*watchdog*) APIP terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP

Pengawasan internal yang baik merupakan alat yang dapat membantu Pemda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui pengawasan internal yang efektif, pemerintah juga dapat menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan daerah dapat tercapai.

Inspektorat diharapkan mampu melaksanakan perannya dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan untuk perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan SPIP. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai fungsi Pengawasan Intern yang mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjamin kualitas yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta bersih dari praktek KKN (Angel,2017). Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Peran Pengawasan Internal (*watchdog*) APIP berpengaruh positif terhadap pelaksanaan maturitas SPIP

2.9.3. Pengaruh Peran Konsultan (*consultant*) APIP terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP

Perubahan paradigma peran APIP dari *watch dog* menjadi konsultan diharapkan mampu memberikan pembinaan, pembimbingan, saran terkait aktivitas organisasi dan lingkup penugasan dapat disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan peran sebagai konsultan, Inspektorat Kabupaten Solok Selatan membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada semua OPD yang ingin melakukan konsultasi terkait dengan masalah-masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat OPD sampai tingkat desa, khususnya lagi konsultasi pertanggungjawaban dana desa. Pelaksanaan peran sebagai konsultan Inspektorat untuk terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya, karena sebagai konsultan Inspektorat harus lebih banyak tahu dari pada pihak yang melakukan konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, dengan melakukan pembinaan, pelatihan dalam masalah-masalah seperti pengelolaan keuangan daerah inspektorat akan mampu mendukung pelaksanaan SPIP yang baik pada instansi pemerintah (Angel, 2017). Maka didapatkan hipotesis:

H3 : Peran Konsultan (*consultant*) APIP berpengaruh positif terhadap pelaksanaan maturitas SPIP

2.9. 4. Pengaruh Peran Penjamin Mutu (*quality assurance*) APIP terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP

Seiringan dengan perubahan peran menjadi konsultan, Inspektorat juga mengalami pergeseran menjadi penjamin mutu. Sebagai agen perubahan yang memberikan penilaian independen tentang manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola sebagai contoh dapat melaksanakan tugas audit terkait keuangan, kinerja, ketaatan, dan keamanan sistem. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

mencapai tujuan organisasi (Angel, 2017). *Quality Assurance* dalam setiap pelaksanaan audit, diharapkan mampu mengidentifikasi risiko dan mendorong proses perbaikan yang berkelanjutan, mendorong Inspektorat Kabupaten Solok Selatan untuk melaksanakan salah satu perannya sebagai penjamin mutu. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Peran penjamin mutu (*quality assurance*) APIP berpengaruh positif terhadap pelaksanaan maturitas SPIP

2.9.5. Pengaruh Peran Katalisator APIP terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP

Pada peran auditor internal sebagai katalisator, auditor internal akan ikut berperan mulai dari penentuan tujuan yang hendak dicapai sampai dengan menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Bahkan diperkirakan proses perubahan ini tidak berhenti sejalan dengan dinamika dari manajemen risiko (Simbolon, 2010). Sebagai katalis, apip berperan sebagai fasilitator yang mendorong perubahan kearah yang lebih baik. Peran auditor internal sebagai katalisator hampir sama dengan peran auditor internal sebagai konsultan yang merupakan paradigma baru dari peran auditor internal. Meilani dan Widiastuti (2015) peran auditor sebagai katalis berdasarkan persepsi karyawan berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan dari organisasi, khususnya dalam membantu karyawan dan memberikan nilai tambah bagi manajemen, terutama rekomendasi yang dihasilkan dalam melakukan pemeriksaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan melaksanakan perannya sebagai katalisator apip melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang mendorong organisasi kearah lebih baik, sehingga akan membantu efektivitas pelaksanaan SPIP organisasi tersebut. Sehingga diperoleh hipotesis:

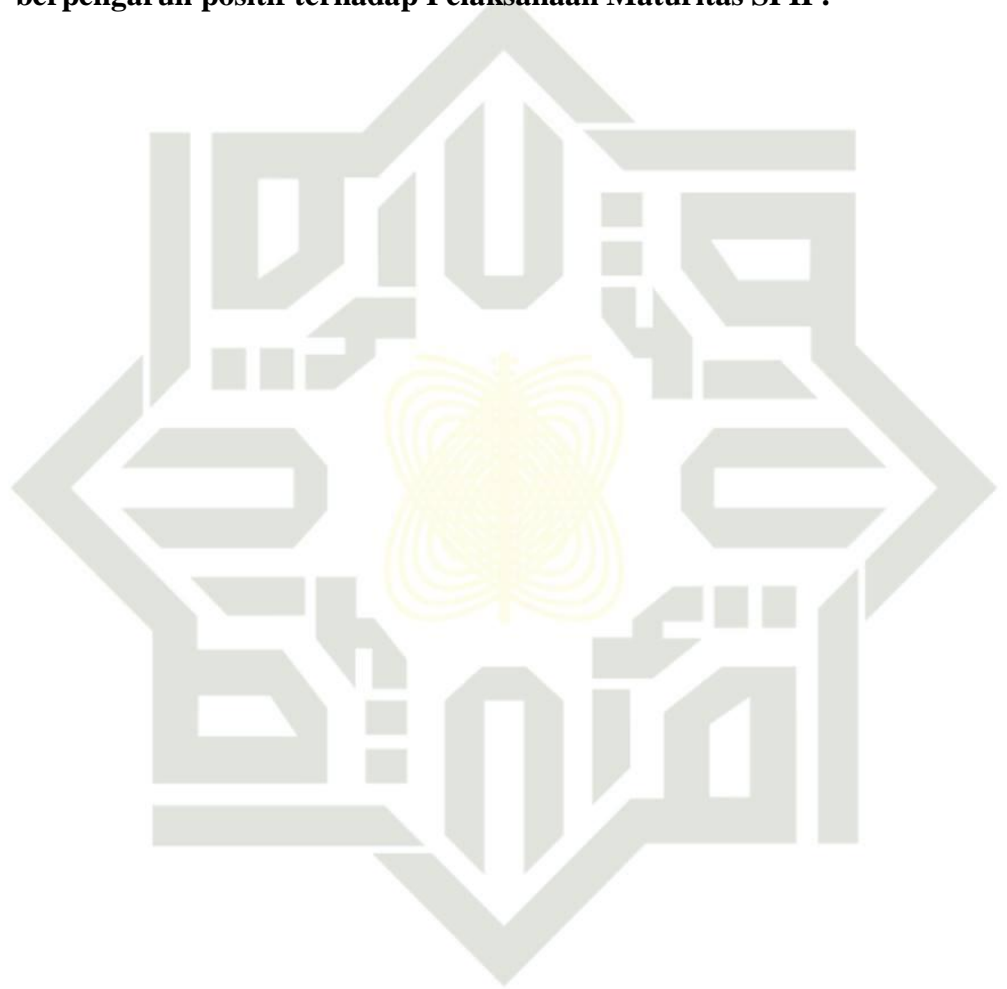
H5: Peran Katalisator APIP berpengaruh positif terhadap pelaksanaan maturitas SPIP

2.9.6. Pengaruh Peran Kepemimpinan, Pengawasan Internal (*watchdog*), Konsultan (*consultant*), Penjamin Mutu (*quality assurance*), dan Katalisator APIP terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP.

Dengan kepemimpinan yang baik, APIP diharapkan dapat membantu pelaksanaan maturitas spip. Karena posisi apip di sini adalah sebagai pembina dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Peran pengawasan internal juga mampu mendukung pelaksanaan maturitas spip yang baik. Dengan pengawasan internal yang efektif oleh APIP, dapat menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik oleh setiap OPD sehingga tujuan daerah dapat tercapai. Peran apip sebagai konsultan akan mampu membantu setiap organisasi dalam menanggapi masalah-masalah yang ada. Dengan meminta saran kepada apip terkait masalah yang tengah dihadapi. Peran penjamin mutu (*quality assurance*) menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai *quality Assurance* apip diharapkan mampu mengidentifikasi risiko sehingga kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sebagai Katalisator, apip membantu setiap instansi dalam menentukan

tujuan yang hendak dicapai dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan begitu, diperoleh hipotesis:

H₀ : Peran Kepemimpinan, Pengawasan Internal, Konsultan (*consultant*), Penjamin Mutu (*quality Assurance*), dan Katalisator APIP berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.

3.2. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dikembangkan dengan pendekatan kuantitatif eksplanatif. Pendekatan *eksplanatory*, yaitu pendekatan yang digunakan peneliti disamping untuk menggali data dari responden, juga untuk menguji hipotesis. Pada penelitian eksplanatif menjelaskan hubungan kausal antara variable-variable melalui pengujian hipotesis. Menurut Kriyanto, peneliti perlu melakukan kegiatan berteori untuk menghasilkan dugaan awal (hipotesis) antar variable yang satu dengan yang lainnya. Menurut Bungin (2011), bahwa kuantitatif eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu hubungan suatu variable dengan variable yang lain untuk menguji suatu hipotesis.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu bertujuan untuk menguji hipotesis yang berupa pengaruh antar variable. Di dalam penelitian ini pengaruh yang diteliti meliputi peran kepemimpinan, pengawasan internal, konsultan (*consultant*), penjamin mutu (*quality assurance*), dan katalisator terhadap pelaksanaan maturitas sip.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pengawas internal pada kantor Inspektorat Kabupaten Solok Selatan. Sampel dalam penelitian ini adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh aparat pengawas internal di Inspektorat Kabupaten Solok Selatan yang berjumlah 30 orang. Metode pemilihan sampel dilakukan dengan metode sensus, yaitu menggunakan seluruh populasi sebagai sampel.

3.4. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah jawaban responden atas kuesioner yang disebarakan langsung kepada auditor atau staf pemeriksaan yang bekerja pada Kantor Inspektorat Kabupaten Solok Selatan. Sumber data penelitian ini adalah skor total yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dikirim kepada aparat pengawas internal pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket (kuesioner). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survey yaitu metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan tertulis. Metode survey yang digunakan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dalam bentuk pertanyaan tertulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6. Variabel Penelitian

3.6.1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Pelaksanaan maturitas SPIP.

3.6.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen pada penelitian ini adalah kepemimpinan, pengawasan internal (*watchdog*), konsultan (*consultant*), penjamin mutu (*quality assurance*), dan katalisator.

3.7. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tertentu di lapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Definisi operasional dan pengukuran variabel dijelaskan pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.1

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi Variabel Penelitian	Indikator	Pengukuran
Pelaksanaan Maturitas SPIP (Y) merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. (Bpkp.go.id)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan (Bpkp.go.id)	Skala Likert
Kepemimpinan (X1) secara luas meliputi proses mempengaruhi	1. Instruksi 2. Konsultasi	Skala likert

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

<p>dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. (Rivai dan Mulyadi, 2011)</p>	<p>3. Partisipasi 4. Delegasi 5. Pengendalian (Rivai, 2010)</p>	
<p>Pengawasan Internal (watchdog) (X2) adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2011 pasal 1)</p>	<p>1. Mata dan Telinga Manajemen 2. Mengawasi dokumen yang masuk dan keluar 3. Mengawasi Kinerja Karyawan 4. Mengawasi Ketaatan dan Kepatuhan (Any Fitri Primayanti, 2016)</p>	<p>Skala Likert</p>
<p>Konsultan (consultant) (X3) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsultan berarti ahli yang tugasnya memberi petunjuk, pertimbangan, atau nasihat dalam suatu kegiatan (penelitian, dagang, dsb) penasihat.</p>	<p>1. Mitra Instansi dan Pegawai 2. Memberikan Jasa Konsultasi 3. Memberikan Saran dan Masukan 4. Menganalisis Sumber Daya 5. Operasional Audit (Any Fitri Primayanti, 2016)</p>	<p>Skala likert</p>
<p>Penjamin Mutu (X4) adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian (review) mutu. (Fattah, 2013)</p>	<p>1. Review 2. Evaluasi 3. Pemantauan (Brifana Sastriawati Nugraheni dan Indah Mustikawati, 2016)</p>	<p>Skala Likert</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Katalisator (X5) menurut KBBI adalah seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator dan <i>Agent of Change</i> 2. Perencanaan dan Pembuat Keputusan 3. Mengidentifikasi dan Menganalisis Risiko 4. <i>Quality Assurance</i> (Any Fitri Primayanti, 2016) 	<p>Skala likert</p>
---	--	---------------------

Sumber: Kumpulan Penelitian Tahun 2019

3.8. Teknik Analisis Data

3.8.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang menggunakan ukuran frekuensi sebagai alat untuk mendiskripsikan dan menggambarkan data responden.

3.8.2. Uji Kualitas Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner, sehingga kualitas kuisioner, kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan dan faktor situasional merupakan suatu yang berperan sangat penting dalam penelitian ini. Keabsahan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat pengukur pada variabel yang akan diteliti. Jika alat yang dipakai dalam proses pengumpulan data tidak andal atau tidak bisa dipercaya, maka hasil penelitian yang didapat tidak akan bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu dalam penelitian ini diperlukannya uji reliabilitas dan uji validitas.

3.8.4. 1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu angket yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu angket dapat dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam peneliti ini dilakukan dengan cara pengukuran sekali saja. Pengukuran hanya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pernyataan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0.6 (Ghozali 2016).

3.8.4. 2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu angket. Suatu angket dapat dikatakan valid apabila pernyataan-pernyataan yang terdapat pada angket mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh angket tersebut. Perhitungan uji validitas ini menggunakan program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk degree of freedom (df) $= n - 2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2016).

3.8.3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik. Apabila uji asumsi klasik terpenuhi, maka analisis regresi dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan tiga pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang dipergunakan dalam penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid, dengan data yang digunakan secara teori adalah tidak bias, konsisten dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Ghozali, 2011).

3.8.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Asumsi yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Jika asumsi dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2016). Uji yang digunakan untuk uji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnoff (Ghozali, 2016), yaitu:

H_0 : Residual berdistribusi normal

H_1 : Residual tidak berdistribusi normal

Jika nilai signifikansi pada uji ini lebih besar dari 5%, maka H_0 diterima dan residual berdistribusi normal (Ghozali, 2016).

3.8.3.2 Uji Multikolineraritas

Menurut Ghozali (2016), uji multikolineraritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Pengujian multikolineraritas dapat diamati melalui Variable Inflation Factor (VIF) dengan syarat $VIF < 10$, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolineraritas (Ghozali, 2016).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Dapat dikatakan heteroskedastisitas apabila residual tersebut memiliki varians yang tidak sama, namun dikatakan homoskedastisitas apabila residual memiliki variance yang sama. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Gejser dengan cara meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Apabila nilai probabilitas (sig) > dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.8.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi linier berganda bertujuan untuk meramalkan bagaimana naik turunnya variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi nilainya (Sugiyono, 2016).

Pengujian atas variabel-variabel penelitian menggunakan analisis regresi berganda dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak antara semua variabel independen (Peran kepemimpinan, pengawas internal (*watchdog*), konsultan (*consultant*), penjamin mutu (*quality assurance*), dan katalisator terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP secara simultan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Kemudian dilakukan pengecekan dengan melakukan plot data untuk melihat adanya data yang linier atau tidak linier. Jika hasil regresi baik, maka hasil analisis regresi layak dijadikan sebagai rekomendasi untuk pengetahuan atau untuk tujuan pemecahan masalah praktis. Persamaan regresi linier adalah sebagai berikut:

$$y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e;$$

Keterangan:

- Y = Pelaksanaan Maturitas SPIP
- α = Bilangan konstanta
- β = koefisien garis regresi
- X_1 = Kepemimpinan
- X_2 = Pengawas Internal (*Watchdog*)
- X_3 = Konsultan (*Consultan*)
- X_4 = Penjamin Mutu (*Quality Assurance*)
- X_5 = Katalisator
- e = Error

3.8.4. Uji Hipotesis

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel yang diketahui (Ghozali, 2011). Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel independen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap variabel dependen menggunakan analisis regresi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

3.8.4. 1 Uji Signifikansi Variabel (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing (secara individu/parsial) variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini merupakan uji lanjutan yang dapat dilakukan setelah ada kepastian uji modelnya (uji F) hasilnya signifikan. Kriteria signifikansi variabel untuk teknik analisis regresi linear berganda sama dengan kriteria signifikansi pada teknik analisis regresi linear sederhana. Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai t dan nilai signifikansi p. Jika hasil analisis menunjukkan nilai $p \leq 0,05$ maka pengaruh variabel independen terhadap sary variabel dependen adalah secara statistik signifikan pada level alfa sebesar 5%. Sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan nilai $p > 0,05$ maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya secara statistik tidak signifikan. Interpretasi teori dan empiris hubungan/pengaruh/dampak variabel independen terhadap dependennya dengan melihat tanda (postif atau negatif) pada nilai koefisien regresinya.

3.8.4. 2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F merupakan sebuah metode untuk menguji apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama/stimultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai F dan nilai signifikansi p. Jika hasil analisis menunjukkan nilai $p \leq 0,05$ maka model persamaan regresinya signifikan pada level alfa sebsar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

linear berganda sudah tepat. Sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan nilai $p > 0,05$ maka model persamaan regresinya tidak signifikan pada level alfa 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linear berganda belum tepat. Uji model ini merupakan uji yang harus dipenuhi terlebih dahulu signifikansinya sebelum melanjutkan ke uji signifikansi variabel (uji t), uji F ini bersifat *necessary condition*, yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji signifikansi variabel.

3.8.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi diantara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi terikat (Ghozali, 2011).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan, pengawas internal (*watchdog*), konsultan (*consultant*), penjamin mutu (*quality assurance*), dan katalisator berpengaruh secara simultan terhadap pelaksanaan maturitas SPIP oleh Kantor Inspektorat di Kabupaten Solok Selatan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) pada Kantor Inspektorat di Kabupaten Solok Selatan. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) pada Kantor Inspektorat di Kabupaten Solok Selatan yang berjumlah 30 orang.

Berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rsquare (R^2) sebesar 0,711 memiliki arti bahwa sebesar 71,1 % pelaksanaan maturitas SPIP dijelaskan oleh variable independen peran kepemimpinan, pengawas internal (*watchdog*), konsultan (*consultant*), penjamin mutu (*quality assurance*), dan katalisator. Sedangkan sisanya 28,9 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil dari olahan data ini menunjukkan bahwa variabel peran kepemimpinan, pengawas internal (*watchdog*), konsultan (*consultant*), penjamin mutu (*quality assurance*), dan katalisator dalam menjelaskan pelaksanaan maturitas SPIP cukup besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Kepemimpinan berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap pelaksanaan maturitas SPIP oleh kantor inspektorat di Kabupaten Solok Selatan. Nilai t hitung sebesar 2,839 lebih besar dari nilai t tabel 2,063 ($2,839 > 2,063$) dan nilai signifikan sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,009 < 0,05$) dengan koefisien regresi 0,218. Pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh positif, yaitu jika semakin baik penerapan peran kepemimpinan oleh APIP maka akan semakin mendukung dan meningkatkan pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Solok Selatan.
 3. Pengawas internal (*watchdog*) berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan maturitas SPIP oleh Kantor Inspektorat di Kabupaten Solok Selatan. Nilai t hitung sebesar 2,600 lebih besar dari nilai t tabel 2,063 ($2,600 > 2,063$) dan nilai signifikan sebesar 0,017 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,016 < 0,05$) dengan koefisien regresi 0,366. Pengaruh yang ditimbulkan adalah positif, yaitu semakin baik penerapan peran pengawas internal (*watchdog*) oleh APIP maka akan semakin mendukung dan meningkatkan pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Solok Selatan.
 4. Konsultan (*consultant*) berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan maturitas SPIP oleh Kantor Inspektorat di Kabupaten Solok Selatan. Nilai t hitung sebesar 2,318 lebih besar dari nilai t tabel 2,063 ($2,318 > 2,063$) dan nilai signifikan sebesar 0,042 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,029 < 0,05$) dengan koefisien regresi 0,176. Pengaruh yang ditimbulkan adalah positif, yaitu semakin baik penerapan peran konsultan (*consultant*) oleh Aparat Pengawas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Internal Pemerintah (APIP) maka akan semakin mendukung dan meningkatkan pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Solok Selatan.
5. Penjamin mutu (*quality assurance*) berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan maturitas SPIP oleh Kantor Inspektorat di Kabupaten Solok Selatan. Nilai t hitung sebesar -3,461 lebih besar dari nilai t tabel -2,063 ($-3,461 > -2,063$) dan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$) dengan koefisien regresi -0,265. Pengaruh yang ditimbulkan adalah negatif, yaitu semakin tinggi penerapan peran penjamin mutu oleh APIP maka semakin mempersulit dan memperlambat perwujudan pelaksanaan maturitas SPIP yang baik.
6. Katalisator berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan maturitas SPIP oleh Kantor Inspektorat di Kabupaten Solok Selatan. Memiliki nilai t hitung sebesar 2,605 lebih besar dari nilai t tabel 2,063 ($2,605 > 2,063$) dan nilai signifikansi sebesar 0,016 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,016 < 0,05$) dengan koefisien regresi 0,195. Pengaruh yang ditimbulkan adalah positif, yaitu semakin baik penerapan peran katalisator oleh APIP maka akan semakin mendukung terwujudnya pelaksanaan maturitas SPIP yang baik.
7. Secara simultan variable independen peran kepemimpinan, pengawas internal (*watchdog*), konsultan (*consultant*), penjamin mutu (*quality assurance*), dan katalisator berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan maturitas SPIP. Berdasarkan hasil uji f didapatkan bahwa nilai f hitung diperoleh sebesar $15,275 > f$ tabel sebesar 2,62 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.

5.2. Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Wilayah atau ruang lingkup untuk objek penelitian sebagai populasi dan sampel dalam penelitian terbatas, yaitu hanya dilakukan pada Kantor Inspektorat di Kab. Solok Selatan. Hal ini disebabkan karena Kab. Solok Selatan yang masih memiliki level maturitas yaitu level 2.
2. Penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan maturitas SPIP hanya menggunakan beberapa variabel, yaitu kepemimpinan, pengawas internal (*watchdog*), konsultan (*consultant*), penjamin mutu (*quality assurance*), dan katalisator.
3. Penelitian ini dilakukan saat masa libur semester mahasiswa yang menyebabkan penyebaran kuesioner *pre test* kepada mahasiswa harus melalui *googleform*.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan peneliti pada penelitian selanjutnya untuk penelitian dibidang yang sama adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup yang digunakan sebagai objek penelitian.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel dalam penelitian terhadap pelaksanaan maturitas SPIP, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- AAIPI. (2013). Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).
- Aikins, K. S. 2012. Determinants of Auditee Adoption of Audit Recommendations: Local Government Auditors Perspective. *Journal of Budgeting, Accounting, and Financial Management*. pp: 195-220.
- Al-qur'an Surah Al-Hujurat [49] ayat 6.
- Al-qur'an Surah An-Nahl [16] ayat 90
- Angel M., Grace B. Nangoi, dan Jenny Morasa, 2017, Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal Riset Ak dan Auditing*, Vol. 8, No. 2, hal 20-29.
- Anonim. 2016b. "Disfungsi Pengawasan Internal Kppod" <https://www.kppod.org/berita/view?id=389>. Diakses 5 Oktober Pukul 19.10
- Arfiani, Wa Ode, Masdar Mas'ud, dan Suriyanti. 2020. Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Pulau Taliabu. *PARADOKS: JURNAL ILMU EKONOMI* Volume 3. No.1. Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia
- Bagus, Ida Dwika Maliawan, dkk. 2017. Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris pada Bank Mandiri Kantor Cabang Area Denpasar). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8, No. 2.
- Bastian, Indra. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bahtsi, Jonathan. 2012. Internal Auditing and Its Stakeholders: Understanding Perceptions, Achieving Potential. The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, Taufan dan Nono Supriatna. 2016. Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol 4 No. 1 hal 941-948

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Elheser Y., Adri Paton, dan Anwar Alaydrus. 2016. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan. *E-Journal Administrative Reform*, Vol. 4 No. 1, Hal 65 –78.
- Fahmi, Irham. 2012. *Manajemen Kepemimpinan, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Albeta, Bandung.
- Fatresia, Cindy. 2017. Persepsi Karyawan Terhadap Peran Auditor Internal (Studi Kasus pada PT. Mitra Karya Plastindo). *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- GemaMedianet. “BPK RI Serahkan LHP LKPD 2018 Dalam Paripurna DPRD Sumbar, Moermahadi: Kewajaran Bukan Jaminan Terbebas dari “Fraud” <http://www.gemamedianet.com/2019/04/bpk-ri-serahkan-lhp-lkpd-2018-dalam.html>. Di akses pada 21 November 2019, pukul 21.20.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro
- Sumbarprov. 2018 . Penguatan SPI dalam rangka peningkatan kualitas LKPD, APIP dan Dana Desa Sis keudes https://inspektorat.sumbarprov.go.id/images/2018/02/file/Penguatan_SPI_P_dlm_rangka_peningkatan_Kualitas_LKPD,APIP_dan_DD_Siskeudes.pdf. Di akses pada 21 November 2019, pukul 20.15
- Padang. Bpk. go. id. <https://padang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Pidato-Kalan-Penyerahan-LHP-LKPD-2017-Sesi-21.pdf>. Di akses pada 21 November 2019, pukul 21.10
- Junedah, Lastri. 2019. Pengaruh Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Serta Implementasi E-Planning dan E-Budgeting Terhadap Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). *Tesis*. Lampung: Pascasarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Kadarusman, D. 2012. *Natural Intelligence Leadership: Cara Pandang Baru Terhadap Kecerdasa dan Karakter Kepemimpinan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khyantono, Rachmad. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Malang : Kencana Media Group.
- Kulitinta. 2018. Lemahnya pengawasan inspektorat dalam penggunaan dana desa rawan korupsi. <https://www.kulitinta.id/2018/08/01/lemahnya-pengawasan-inspektorat-penggunaan-dana-desa-rawan-korupsi/>. Diakses pada 12 Oktober 22.45 WIB
- Latifa, Zumriyatun. 2010. Analisis Penyelenggaraan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dua Pemda di Sumatera Barat. *Tesis*. Padang: Universitas Andalas.
- Latifah, N.P. 2010. Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi *Agency Theory* di Sektor Publik?. *Fokus Ekonomi* Vol. 5 No.2 Desember 2010: 85 - 94.
- Lubis, Ibrahim, 2015. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahesthi, Maruti Giri dan Muhammad Dahlan, 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, volume 13 Nomor 2.
- Mailoor, Jefri H, Jullie J. S, dan Hendrik G. 2017. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap *Good Governance* (Studi Empiris di Kab. Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. Vol. 8, Nomor. 2.
- Marlaini, Aliamin, dan Mirna Indriani. 2018. Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat Di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 4, No. 1.
- Masdan, Susan Rabbany, Ventje Ilat, Winston Pontoh. Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo. *Tesis*. Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Matei, A.M., Herman Karamoy, Linda Lambey, 2017. Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, Vol. 8, No. 1, 86-96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Maya, Sari. 2015. Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SINEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Meilani, A & Y., Widiastuti (2015) Employee UPBJJ-UT Perceptions of The Role Auditor Internal Audit. *Conference in Business, Accounting, and Management*. 2(1), 34-45
- Mukmin, Hasan. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 62
- Nanang, Fattah. 2013. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawa Budi Prakoso. 2015. Analisis Determinan Efektivitas Audit Internal Pada Sektor Pemerintahan. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Ningsih, Yuni dan Kiswanto. 2019. Prinsip Perilaku APIP, Kualitas Audit dan Komitmen Profesional sebagai moderating (Studi Empiris di BPKP Perwakilan Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Pajak*. Vol. 7 No. 1
- Novriansa, Agil dan Bambang Riyanto. 2016. Role Conflict and Role Ambiguity on Local Government Internal Auditors: The Determinant and Impacts. *Journal of Indonesian Economy and Business*. Vol.31 (1), pp: 63-82.
- Nugraheni, Brifana Satriawati dan Indah Mustikawati. 2016. Peran Audit Internal sebagai alat bantu manajemen untuk menunjang keefektifan pengendalian internal pemberian kredit pada PT. BRI (Persero) TBK. Kantor Cabang Wates. *Jurnal Profita Edisi 5*.
- Nurfa, Muhammad Fajrin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peran Inspektorat Daerah sebagai Konsultan dan Katalis (Studi kasus pada Pemprov. Sulawesi Selatan). *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin).
- Papeo, Fitrianty, Jullie J. Sondakh, dan Jenny Morasa. 2017. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing (Goodwill)* Vol. 8 No. 2.
- Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 pasal 3 ayat 2 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 47 Tahun 2011 Pasal 4 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional bahwasannya fungsi Pengawasan Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Pratiwi, Widya, 2012. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern. *Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim*. Bukittinggi.

Primayanti, Any Fitri. 2016. Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peran Auditor Internal (Studi Kasus Pada Hotel Santika Premiere Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanatha Darma.

Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. 2011. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi Edisi Ke-3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rivai. 2010. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Saefutri, Wutsqaa Imani. 2018. Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah.

Sadi, Santha Julia, H. Ahmad Rifa'i L, dan Hamdani Husnan. 2016. Faktor-faktor yang memperngaruhi kualitas laporan keuangan dan akuntabilita kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Universitas Trunojoyo*, volume 12 Nomor 2 hal 158 – 172.

Sari, Dea Nurfika dan Haryanto, 2016. Analisis determinan efektivitas auditor internal pada inspektorat Provinsi. D.I Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol. 13, No. 2 : 191-210

Sawono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Siobolon, Harry Andrian. (2010). Paradigma Baru Audit Internal. Dari: [http://akuntansibisnis.wordpress.com /feed/](http://akuntansibisnis.wordpress.com/feed/). Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 16.17.
- Sondak, Cindy Felicia. 2017. Persepsi Auditee Terhadap Peran Auditor Internal Pada PT. FABER CASTELL. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Supriyono. (2016). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta
- Supharso. “Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern” <https://www.klikharso.com/2016/08/penilaian-maturitas-spip.html> Di akses pada 21 November 2019, pukul 21.40.
- Sutaryanto A. dan Sutaryo. 2016. Pengawasan Internal Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung.
- Sumantri, Mohamad Syarif. 2015. *Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktik di Tingkat Pendidikan Dasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryana, Yuyus dan Kartib Bayu. 2010. *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*. Jakarta: Kencana.
- Sutaryo dan Dedi Sinaga. 2018. Government Internal Control System Maturity: The Role of Internal Guidance and External Control of Local Government in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 19 No. 1, Hlm: 24-3.
- Sutaryo. 2018. Determinan Efektivitas Audit Internal Di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 1.
- Tribunnews. 2016. Dewan nilai inspektorat lemah. <https://aceh.tribunnews.com/201608/20/dewan-nilaiinspektorat-lemah> . Diakses 12 Oktober 2020, 22:25 WIB
- Trisnawati, Nina, Wempy Banga, dan Syamsul Alam, 2018. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Konawe. *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol.9, No.2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah

Wati, Lismawati dan Aprilla. 2010. Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah. *SNA XIII*.

Widanarto. 2012. Pengawas internal, pengawasan eksternal dan kinerja pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12 (1): 1–73.

www.Bpkp.go.id

www.transparency.org

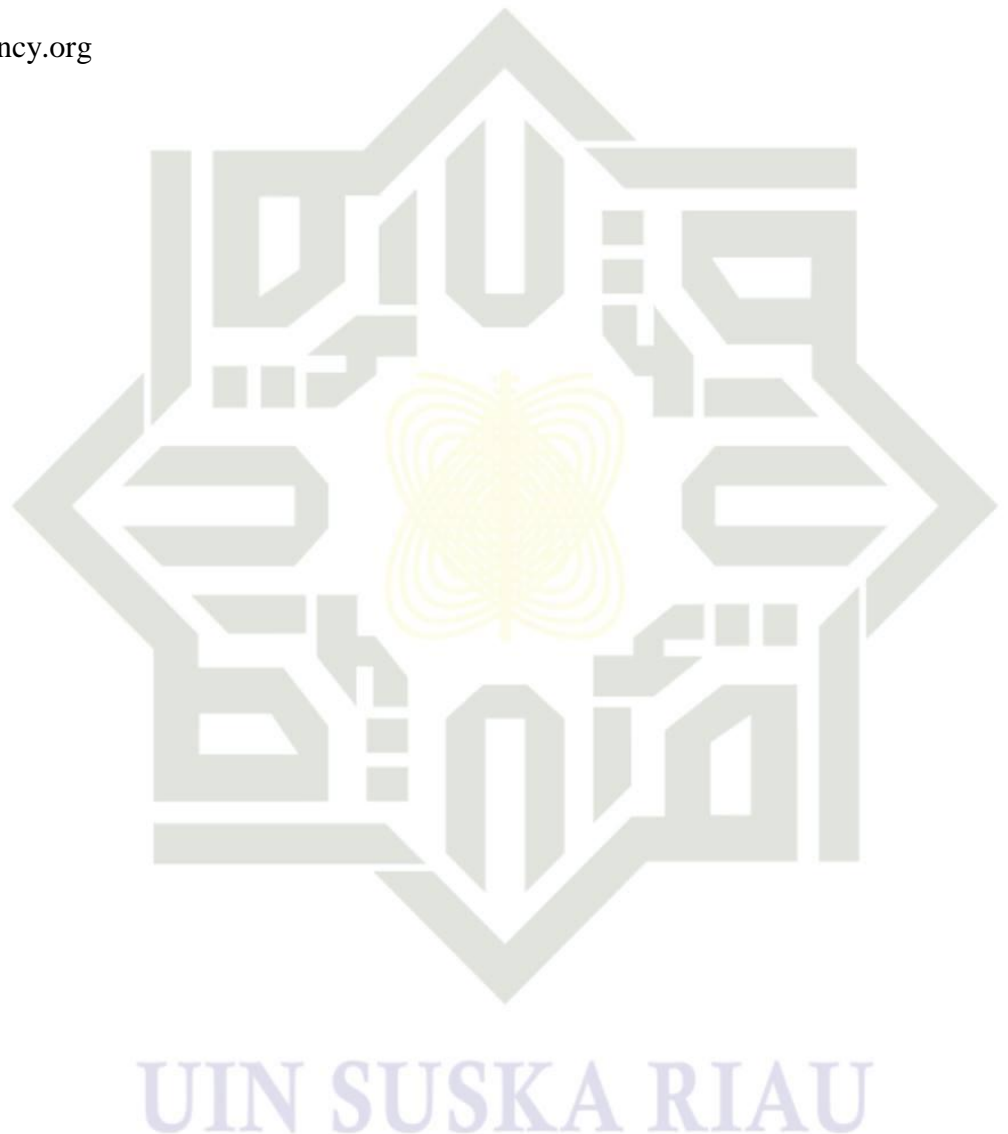
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 1. SURAT PENGANTAR KUESIONER PENELITIAN

Pekanbaru, 12 Februari 2020

Hari: Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu Inspektorat Kabupaten Solok Selatan

di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian untuk penyusunan skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan ini saya:

Nama : Desri Helen Sutama

NIM : 11673201429

Prodi/ Fakultas : Akuntansi S1/Ekonomi dan Ilmu Sosial

Bersama ini peneliti bermaksud menyusun penelitian yang berjudul **“Pengaruh Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan)”**. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Oleh karena maksud tersebut, dengan segala kerendahan hati peneliti mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Partisipasi Bapak/Ibu dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan kuesioner sebagaimana sesuai dengan kenyataan pada diri Bapak/Ibu sangat kami hargai. Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi, tidak untuk dipublikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.

Demikian pengantar kuesioner penelitian ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, peneliti ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Desri Helen Sutama
NIM.11673201429

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 2. KUESIONER

Identitas Responden:

Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia sesuai identitas Bapak/Ibu/Saudara/Saudari responden saat ini.

Nama :

Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita

Pendidikan Terakhir : ☐ DIII ☐ S1/DIV ☐ S2 ☐ S3

Bagian/seksi :

Diklat yang Pernah : ☐ Pembentukan ☐ Diklat Manajemen

Dikuti ☐ Auditor ☐ Risiko

☐ Diklat Tata Kelola ☐ SPIP ☐ Belum Ada PEMDA

Lain-lain

Masa Kerja : ☐ < 1 Tahun ☐ 1-3 Tahun ☐ 3-5 Tahun
☐ >5 Tahun

Jenjang : ☐ Pengendali Mutu ☐ Pengendali Teknis

☐ Ketua Tim ☐ Anggota Tim

Petunjuk Pengisian : Pada daftar pernyataan dibawah ini, isilah dengan menggunakan tanda (✓) kondisi atau fakta yang sebenarnya terjadi menurut perspektif professional anda pada salah satu dari lima kolom yang tersedia di sebelah kanan dengan skala 1, 2, 3, 4, 5. Yang menunjukkan arti :

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
A. Peran Kepemimpinan (X1)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
	Instruksi					
	APIP memberikan arahan dalam pelaksanaan SPIP					
	APIP memotivasi pegawai untuk menyelenggarakan SPIP					
	Konsultasi					
	APIP selalu membangun konsultasi dan komunikasi dengan Instansi Pemerintah					
	APIP menjalin kerjasama dengan Instansi Pemerintah					
	APIP memberikan saran kepada Instansi Pemerintah					
	Partisipasi					
6	APIP ikut serta dalam pembinaan penyelenggaraan SPIP					
	Delegasi					
7	APIP membantu pimpinan Instansi dalam mendelegasikan tugas yang tepat kepada pegawai					
	Pengendalian					
8	APIP melakukan Pengendalian terhadap aktivitas Instansi agar sesuai dengan SPIP					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

B. Peran Pengawas Internal (*Watchdog*) (X2)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
	Mata dan Telinga Manajemen					
	APIP memberikan keyakinan memadai bahwa proses tata kelola pemerintah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku					
	Mengawasi dokumen yang masuk dan keluar					
	APIP melakukan pemeriksaan secara mendadak					
	Mengawasi Kinerja Karyawan					
	APIP melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai					
4	APIP menegur pegawai yang bekerja tidak sesuai peraturan					
	Mengawasi Ketaatan dan Kepatuhan					
5	APIP mengawasi ketaatan Instansi Pemerintah terkait pelaksanaan SPIP					
6	APIP hanya memeriksa ketaatan mengenai tata kelola pemerintah yang baik					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peran Konsultan (X3)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
	Mitra Instansi dan Pegawai					
	APIP membantu Instansi dalam pengambilan keputusan					
	APIP membimbing Instansi dan Pegawai dalam mengenali risiko yang dapat mengancam tujuan Instansi					
	Memberikan Jasa Konsultasi					
	APIP membantu Instansi Pemerintah dalam mengelola risiko-risiko					
	APIP mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi Instansi Pemerintah					
	Memberikan Saran dan Masukan					
5	APIP memberikan saran dalam pengelolaan sumberdaya Instansi					
6	APIP menilai dukungan sumberdaya Instansi pemerintah terhadap pencapaian tujuan					
	Menganalisis Sumber Daya					
7	APIP menilai efektivitas fungsi SDM					
8	APIP memastikan ketaatan berbagai aktivitas SDM terhadap kebijakan yang berlaku					
	Operasional Audit					
	APIP memonitoring kegiatan operasional Instansi Pemerintah secara berkesinambungan					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Variabel Penjamin Mutu (Quality Assurance) (X4)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
	Review					
	APIP melakukan review atas kinerja Instansi Pemerintah					
	APIP memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Instansi telah sesuai dengan aturan yang berlaku					
	Evaluasi					
	APIP membandingkan rencana kegiatan dengan hasil/prestasi kegiatan					
	APIP membantu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kegiatan Organisasi					
	Pemantauan					
5	APIP melakukan penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Internal					
6	APIP melakukan penilaian kemajuan suatu kegiatan Instansi pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan					

E. Variabel Katalisator (X5)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
	Fasilitator dan Agent of Change					
	APIP membimbing Instansi Pemerintah dalam mengenali risiko-risiko yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan					
	APIP sebagai fasilitator yang mendorong Instansi melakukan perubahan kearah yang lebih baik					
	Perencanaan dan Pembuat Keputusan					
	APIP terlibat dalam Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah					
	APIP ikut serta dalam Pembuatan Keputusan Strategis Instansi Pemerintah					
	Mengidentifikasi dan Menganalisis Risiko					
5	APIP membantu Instansi Pemerintah dalam mengidentifikasi masalah					
6	APIP melakukan analisis risiko atas aktivitas operasional dan non operasional Instansi					
	Quality Assurance					
	APIP mengarahkan kualitas pelaksanaan SPIP					
	APIP mengarahkan mutu pelayanan Instansi Pemerintah agar sesuai dengan tujuan					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
F. Variabel Pelaksanaan Maturitas SPIP (Y)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
	Lingkungan Pengendalian					
	Instansi pemerintah menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah.					
	Penilaian Risiko					
	Pimpinan Instansi pemerintah menggunakan metode identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah.					
	Instansi pemerintah menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis risiko.					
	Kegiatan Pengendalian					
4	Instansi pemerintah mengidentifikasi tindakan dan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk menangani risiko.					
	Informasi dan Komunikasi					
5	Instansi pemerintah mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi.					
	Pemantauan					
	Instansi melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi terpisah, tindak lanjut rekomendasi hasil audit, dan revaluasi lainnya.					

LAMPIRAN 3. TABULASI DATA

No Responden	Kepemimpinan (X1)								Total X1
	Kp1	Kp2	Kp3	Kp4	Kp5	Kp6	Kp7	Kp8	
RES 1	4	4	4	4	4	4	4	5	33
RES 2	5	4	4	3	4	4	4	4	32
RES 3	4	5	5	5	4	4	4	4	35
RES 4	4	5	5	5	4	4	4	4	35
RES 5	4	5	5	5	4	4	4	4	35
RES 6	5	4	4	4	4	4	5	4	34
RES 7	5	4	4	4	4	5	4	4	34
RES 8	5	5	5	5	4	5	5	4	38
RES 9	5	4	4	4	4	5	4	4	34
RES 10	5	5	5	5	5	5	5	5	40
RES 11	5	4	4	4	4	5	4	4	34
RES 12	5	5	5	5	5	5	4	4	38
RES 13	5	5	5	5	5	5	5	4	39
RES 14	5	5	5	5	5	5	4	4	38
RES 15	5	5	5	5	5	5	4	4	38
RES 16	4	3	2	3	4	3	2	3	24
RES 17	5	5	5	5	5	5	4	4	38
RES 18	5	5	5	5	5	5	4	4	38
RES 19	5	5	5	4	5	4	4	4	36
RES 20	5	5	5	5	5	5	4	4	38
RES 21	5	5	5	5	5	5	5	5	40
RES 22	5	4	4	4	4	5	4	4	34
RES 23	5	5	5	5	5	5	5	5	40
RES 24	3	4	5	5	5	4	5	4	35
RES 25	4	4	3	4	3	2	4	3	27
RES 26	3	4	3	4	3	4	4	2	27
RES 27	4	4	4	5	4	4	4	3	32
RES 28	5	4	4	4	4	4	3	2	30
RES 29	4	4	4	5	4	4	5	4	34
RES 30	5	5	5	4	5	5	5	5	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No Responden	Pengawas Internal (X2)						Total X2
	Pi1	Pi2	Pi3	Pi4	Pi5	Pi6	
RES 1	3	4	4	4	4	2	21
RES 2	5	5	4	2	4	2	22
RES 3	3	4	4	5	5	3	24
RES 4	4	4	4	3	4	3	22
RES 5	4	4	4	4	4	3	23
RES 6	4	4	4	3	5	3	23
RES 7	4	4	3	4	4	3	22
RES 8	3	4	3	4	3	3	20
RES 9	4	4	3	4	4	3	22
RES 10	5	5	4	4	4	4	26
RES 11	4	4	4	2	4	2	20
RES 12	4	3	4	3	4	3	21
RES 13	3	4	4	4	3	4	22
RES 14	5	5	5	4	5	4	28
RES 15	4	4	3	4	4	3	22
RES 16	4	4	3	3	4	3	21
RES 17	3	4	3	3	4	3	20
RES 18	4	4	4	4	4	3	23
RES 19	5	4	4	4	4	4	25
RES 20	4	4	3	3	4	3	21
RES 21	4	4	4	4	4	3	23
RES 22	5	5	4	5	5	4	28
RES 23	5	4	4	4	5	4	26
RES 24	5	5	5	4	4	4	27
RES 25	4	4	4	3	4	4	23
RES 26	4	4	4	5	4	4	25
RES 27	4	4	4	4	4	4	24
RES 28	5	4	4	4	4	4	25
RES 29	4	4	4	5	4	4	25
RES 30	5	5	4	5	4	3	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No Responden	Konsultan (X3)									Total X3
	Ks1	Ks2	Ks3	Ks4	Ks5	Ks6	Ks7	Ks8	Ks9	
RES 1	3	4	4	4	4	3	4	4	4	34
RES 2	3	4	3	4	4	4	4	4	5	35
RES 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
RES 4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	37
RES 5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	40
RES 6	5	4	5	5	4	5	5	4	5	42
RES 7	3	3	4	4	4	4	4	4	3	33
RES 8	5	5	5	4	5	5	5	5	5	44
RES 9	3	3	5	4	4	5	4	4	3	35
RES 10	5	5	5	5	5	5	5	5	3	43
RES 11	3	3	4	4	5	4	5	4	3	35
RES 12	3	5	4	5	4	4	5	4	3	37
RES 13	5	5	5	5	5	5	5	4	5	44
RES 14	5	4	4	5	5	4	5	4	5	41
RES 15	5	5	4	4	5	4	5	5	4	41
RES 16	3	3	3	2	3	3	3	5	3	28
RES 17	3	3	3	4	3	4	3	3	5	31
RES 18	4	3	4	5	4	4	5	3	3	35
RES 19	5	5	4	4	5	4	5	5	5	42
RES 20	3	4	3	4	4	3	3	3	3	30
RES 21	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
RES 22	3	5	4	4	4	4	4	4	5	37
RES 23	3	3	3	3	4	3	3	4	5	31
RES 24	3	4	3	4	4	4	4	4	5	35
RES 25	4	4	3	5	4	5	4	4	4	37
RES 26	3	4	4	5	4	4	5	5	3	37
RES 27	4	5	4	4	5	4	4	5	3	38
RES 28	3	4	4	5	4	4	5	4	3	36
RES 29	3	4	4	4	5	4	4	4	3	35
RES 30	3	4	5	4	5	3	3	3	3	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No Responden	Quality Assurance (X4)						Total X4
	Qa1	Qa2	Qa3	Qa4	Qa5	Qa6	
RES 1	5	5	4	4	4	4	26
RES 2	5	4	4	3	5	4	25
RES 3	3	3	3	2	3	3	17
RES 4	4	4	4	4	4	4	24
RES 5	3	3	4	3	3	3	19
RES 6	4	3	4	3	3	3	20
RES 7	4	5	4	3	4	4	24
RES 8	2	2	3	3	2	3	15
RES 9	4	5	4	3	4	3	23
RES 10	3	3	3	3	3	3	18
RES 11	4	5	4	3	4	5	25
RES 12	5	5	5	5	4	5	29
RES 13	5	5	5	5	4	5	29
RES 14	5	5	5	5	4	5	29
RES 15	5	5	5	5	4	5	29
RES 16	5	5	5	5	5	5	30
RES 17	5	5	5	5	4	5	29
RES 18	4	4	4	5	4	4	25
RES 19	5	5	5	5	4	5	29
RES 20	5	5	5	5	4	3	27
RES 21	3	3	3	4	3	3	19
RES 22	4	5	4	3	4	5	25
RES 23	4	4	4	3	3	4	22
RES 24	4	3	4	3	2	5	21
RES 25	4	4	4	4	3	4	23
RES 26	3	3	4	3	4	3	20
RES 27	4	4	4	4	3	4	23
RES 28	4	4	3	3	3	4	21
RES 29	5	4	4	5	5	4	27
RES 30	5	3	3	3	3	3	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No Responden	Katalisator (X5)								Total X5
	Kt1	Kt2	Kt3	Kt4	Kt5	Kt6	Kt7	Kt8	
RES 1	4	4	4	4	4	4	4	3	31
RES 2	2	4	2	2	2	2	3	5	22
RES 3	4	5	3	3	4	4	5	5	33
RES 4	5	4	3	4	4	4	4	4	32
RES 5	4	3	3	3	3	4	4	4	28
RES 6	4	4	2	3	4	5	3	3	28
RES 7	4	3	3	4	4	3	4	4	29
RES 8	4	2	2	2	2	2	3	3	20
RES 9	4	4	3	3	4	3	4	4	29
RES 10	4	5	2	2	4	4	3	4	28
RES 11	3	3	2	2	4	4	4	4	26
RES 12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
RES 13	5	5	4	5	4	4	5	5	37
RES 14	5	5	4	3	5	3	4	5	34
RES 15	4	5	5	3	4	5	4	5	35
RES 16	3	3	3	3	3	4	3	3	25
RES 17	4	4	3	4	4	4	4	4	31
RES 18	4	4	4	3	4	4	4	4	31
RES 19	4	5	2	2	4	4	3	4	28
RES 20	3	3	3	3	3	4	3	3	25
RES 21	5	5	5	4	5	5	4	5	38
RES 22	5	5	3	2	4	3	5	5	32
RES 23	5	5	3	4	4	5	5	5	36
RES 24	4	5	3	3	4	4	4	5	32
RES 25	4	5	3	3	4	4	4	4	31
RES 26	5	5	5	4	5	5	5	5	39
RES 27	4	4	4	4	4	4	4	5	33
RES 28	4	4	3	3	4	4	4	5	31
RES 29	5	5	3	3	4	4	5	4	33
RES 30	4	5	2	2	4	4	3	4	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No Responden	Pelaksanaan Maturitas SPIP (Y)						Total Y
	PMS1	PMS2	PMS3	PMS4	PMS5	PMS6	
RES 1	4	4	3	4	4	4	23
RES 2	4	4	4	4	4	4	24
RES 3	4	4	4	5	5	5	27
RES 4	5	4	3	3	4	5	24
RES 5	4	5	4	5	5	3	26
RES 6	5	4	4	4	5	5	27
RES 7	4	3	4	3	4	4	22
RES 8	5	4	5	5	4	5	28
RES 9	4	4	3	3	4	4	22
RES 10	5	5	5	5	5	5	30
RES 11	4	4	4	3	4	4	23
RES 12	4	4	4	4	4	4	24
RES 13	4	4	5	5	5	5	28
RES 14	5	5	5	4	5	5	29
RES 15	5	5	3	4	5	5	27
RES 16	3	3	3	3	3	3	18
RES 17	4	4	4	4	4	4	24
RES 18	5	4	4	4	5	4	26
RES 19	5	3	4	4	4	4	24
RES 20	4	4	3	3	4	5	23
RES 21	5	5	5	5	5	5	30
RES 22	4	5	4	5	4	5	27
RES 23	4	5	5	5	5	5	29
RES 24	5	5	4	4	4	5	27
RES 25	5	4	4	4	5	5	27
RES 26	5	5	5	5	5	5	30
RES 27	4	4	3	5	5	5	26
RES 28	4	4	3	4	4	4	23
RES 29	5	4	3	4	4	5	25
RES 30	5	5	5	5	5	5	30

LAMPIRAN 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	<i>N Statistics</i>	<i>Range Statistic</i>	<i>Minimum Statistic</i>	<i>Maximum Statistic</i>	<i>Mean</i>		<i>Std. Deviation Statistic</i>	<i>Variance Statistic</i>
					<i>Statistic</i>	<i>Std. Error</i>		
Total X1	30	16	24	40	34.97	.737	4.038	16.309
Total X2	30	8	20	28	23.33	.424	2.324	5.405
Total X3	30	16	28	44	36.86	.790	4.329	18.740
Total X4	30	15	15	30	23.77	.758	4.250	17.220
Total X5	30	19	20	39	30.57	.803	4.400	19.357
Total Y	30	12	18	30	25.77	.533	2.921	8.530
Valid N	30							

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 5. Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas Kepemimpinan (X1)

Correlations

		Total X1
Kp1	Pearson Correlation	.558**
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	30
Kp2	Pearson Correlation	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Kp3	Pearson Correlation	.921**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Kp4	Pearson Correlation	.685**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Kp5	Pearson Correlation	.810**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Kp6	Pearson Correlation	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Kp7	Pearson Correlation	.658**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Kp8	Pearson Correlation	.750**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

2. Hasil Uji Reliabilitas Kepemimpinan (X1)

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Exclude ^a	0	.0
	Total	30	100.0

Listwise deletion based on all variables in the procedure

Reliability Statistics

Croanbach's Alpha	Croanbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.890	.890	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Croanbach Alpha if Item Deleted
Kp1	30.37	13.895	.438	.594	.896
Kp2	30.47	12.740	.793	.793	.866
Kp3	30.53	11.154	.881	.893	.852
Kp4	30.47	13.223	.587	.713	.884
Kp5	30.60	12.662	.747	.667	.869
Kp6	30.53	12.189	.706	.628	.872
Kp7	30.77	13.220	.548	.528	.887
Kp8	30.03	12.378	.650	.581	.878

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hasil Uji Validitas Pengawas Internal (X2)

Correlations

		Total X2
Pi1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.711** .000 30
Pi2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.622** .000 30
Pi3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.662** .000 30
Pi4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.608** .000 30
Pi5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.525** .000 30
Pi6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.706** .000 30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Hasil Uji Reliabilitas Pengawas Internal (X2)

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Exclude ^a	0	.0
	Total	30	100.0

Listwise deletion based on all variables in the procedure

Reliability Statistics

Croanbach's Alpha	Croanbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.698	.717	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Croanbach Alpha if Item Deleted
1	19.20	3.614	.511	.535	.628
2	19.17	4.282	.476	.421	.652
3	19.50	4.052	.500	.307	.639
4	19.53	3.775	.313	.359	.716
5	19.23	4.461	.350	.212	.681
6	20.03	3.689	.516	.448	.627

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hasil Uji Validitas Konsultan (X3)

Correlations

		Total X3
Ks1	Pearson Correlation	.862**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Ks2	Pearson Correlation	.718**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Ks3	Pearson Correlation	.678**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Ks4	Pearson Correlation	.598**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Ks5	Pearson Correlation	.687**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Ks6	Pearson Correlation	.738**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Ks7	Pearson Correlation	.721**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Ks8	Pearson Correlation	.537**
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	30
Ks9	Pearson Correlation	.411*
	Sig. (2-tailed)	.024
	N	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

6. Hasil Uji Reliabilitas Konsultan (X3)

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Exclude ^a	0	.0
	Total	30	100.0

Listwise deletion based on all variables in the procedure

Reliability Statistics

Croanbach's Alpha	Croanbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.831	.840	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Croanbach Alpha if Item Deleted
Ks1	33.13	13.016	.793	.655	.799
Ks2	32.77	14.599	.615	.494	.805
Ks3	32.83	15.040	.571	.519	.810
Ks4	32.63	15.689	.428	.711	.820
Ks5	32.53	15.499	.602	.546	.809
Ks6	32.80	15.062	.658	.620	.803
Ks7	32.63	14.723	.624	.628	.804
Ks8	32.70	16.148	.417	.562	.826
Ks9	32.90	16.300	.211	.316	.860

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Hasil Uji Validitas Penjamin Mutu (Quality Assurance) (X4)

Correlations

		Total X4
Qa1	Pearson Correlation	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Qa2	Pearson Correlation	.889**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Qa3	Pearson Correlation	.883**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Qa4	Pearson Correlation	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Qa5	Pearson Correlation	.754**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Qa6	Pearson Correlation	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Hasil Uji Reliabilitas Penjamin Mutu (Quality Assurance) (X4)

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Exclude ^a	0	.0
	Total	30	100.0

Listwise deletion based on all variables in the procedure

Reliability Statistics

Croanbach's Alpha	Croanbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.906	.909	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Croanbach Alpha if Item Deleted
a1	19.60	11.903	.803	.652	.879
a2	19.67	11.264	.824	.739	.876
a3	19.70	12.631	.836	.730	.879
a4	19.97	11.689	.701	.597	.897
a5	20.13	13.016	.656	.546	.901
a6	19.77	12.599	.667	.546	.899

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Hasil Uji Validitas Katalisator (X5)

Correlations

		Total X5
Kt1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.763** .000 30
Kt2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.703** .000 30
Kt3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.766** .000 30
Kt4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.658** .000 30
Kt5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.820** .000 30
Kt6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.617** .000 30
Kt7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.761** .000 30
Kt8	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.636** .000 30

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Hasil Uji Reliabilitas Katalisator (X5)

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Exclude ^a	0	.0
	Total	30	100.0

Listwise deletion based on all variables in the procedure

Reliability Statistics

Croanbach's Alpha	Croanbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.860	.864	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Croanbach Alpha if Item Deleted
Kt1	26.47	15.085	.681	.623	.835
Kt2	26.33	14.782	.582	.664	.846
Kt3	27.40	14.041	.655	.573	.837
Kt4	27.43	15.289	.530	.568	.852
Kt5	26.70	14.907	.758	.669	.828
Kt6	26.67	15.816	.491	.461	.855
Kt7	26.63	15.206	.681	.616	.835
Kt8	26.33	15.816	.520	.611	.852

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Hasil Uji Validitas Pelaksanaan Maturitas SPIP (Y)

Correlations

		Total Y
Pms1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.645** .000 30
Pms2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.7066** .000 30
Pms3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.753** .000 30
Pms4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.793** .000 30
Pms5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.811** .000 30
Pms6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.708** .000 30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

12 Hasil Uji Reliabilitas Pelaksanaan Maturitas SPIP (Y)

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Exclude ^a	0	.0
	Total	30	100.0

Listwise deletion based on all variables in the procedure

Reliability Statistics

Croanbach's Alpha	Croanbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.838	.842	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Croanbach Alpha if Item Deleted
pms1	21.33	6.713	.507	.437	.830
pms2	21.53	6.120	.652	.447	.804
pms3	21.80	5.752	.598	.432	.817
pms4	21.60	5.628	.662	.585	.802
pms5	21.33	6.161	.725	.547	.793
pms6	21.23	6.323	.573	.438	.819

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 6. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	Y
N		30	30	30	30	30	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2.0072	23.33	36.87	23.77	30.57	25.77
	Std. Deviation	1.01932	2.324	4.329	4.150	4.400	2.921
Most Extremes Differencs	Absolute	.155	.157	.154	.130	.139	.130
	Positive	.120	.157	.154	.085	.090	.127
	Negative	-.155	-.097	-.100	-.130	-.139	-.130
Test Statistics		.155	.157	.154	.130	.139	.130
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,062 ^c	0,057 ^c	0,066 ^c	0,200 ^{c,d}	0,143 ^c	0,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

c. Lilliefors Significance Correction

d. This is a lower bound of the true significance.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov

Unstandardized Residual

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,42811662
Most Extremes Differencs	Absolute	0,074
	Positive	0,074
	Negative	-0,066
Test Statistics		0,0734
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c, d}

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

LAMPIRAN 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (Constant)	3.467	4.903			
TOTALX1	.218	.077	.302	.883	1.132
TOTALX2	.366	.141	.291	.793	1.261
TOTALX3	.176	.076	.260	.790	1.266
TOTALX4	-.265	.076	-.376	.843	1.186
TOTALX5	.195	.075	.293	.786	1.272

Dependent Variable: Total Y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1 (Constant)	4.980	2.765		1.801	.084
TOTALX1	-.073	.043	-.330	-1.677	.106
TOTALX2	.004	.079	.011	.054	.958
TOTALX3	-.015	.043	-.073	-.350	.730
TOTALX4	-.058	.043	-.270	-1.342	.192
TOTALX5	.016	.042	.079	.377	.709

Dependent Variable: ABS_RES

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 9. Hasil Uji Hipotesis

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TOTALX5	.	Enter
	TOTALX4		
	TOTALX1		
	TOTALX2		
	TOTALX3 ^b		

a. Dependent Variable: TOTALY

b. All requested variables entered

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.467	4.903		.707	.486
TOTALX1	.218	.077	.302	2.839	.009
TOTALX2	.366	.141	.291	2.600	.016
TOTALX3	.176	.076	.260	2.318	.029
TOTALX4	-.265	.076	-.376	-3.461	.002
TOTALX5	.195	.075	.293	2.605	.016

a. Dependent Variable: TOTAL Y

Hasil Uji F

Model Summary^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	188.221	5	37.644	15.275	.000 ^b
Residual	59.146	24	2.464		
Total	247.367	29			

a. Predictors: (Constant), TOTALX5, TOTALX4, TOTALX1, TOTALX2, TOTALX3

Hasil Uji Determinasi (R Square)

ANOVA^a

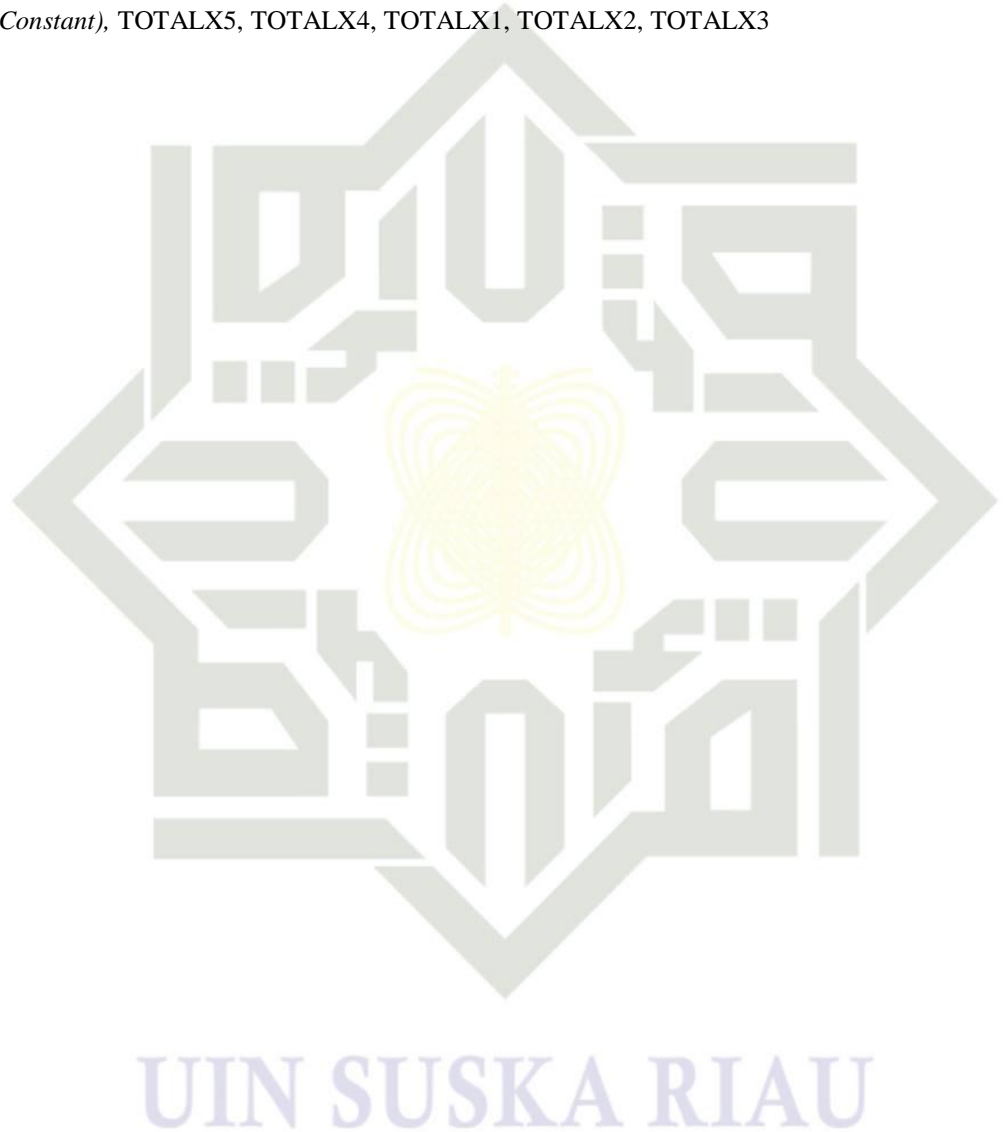
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	Sig.
1	.872 ^a	.761	.711	1.570	.761	15.275	.000

a. Dependent Variable: TOTAL Y

b. Predictors: (Constant), TOTALX5, TOTALX4, TOTALX1, TOTALX2, TOTALX3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


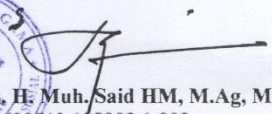





LAMPIRAN 10. Surat Izin Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 UIN SUSKA RIAU	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES <small>Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id</small>								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7624/2019 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Izin Riset </td> <td style="width: 70%; text-align: right; vertical-align: top;"> Pekanbaru, 16 Desember 2019 M 18 Rabiul Akhir 1441 H </td> </tr> </table>		Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7624/2019 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Izin Riset	Pekanbaru, 16 Desember 2019 M 18 Rabiul Akhir 1441 H						
Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7624/2019 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Izin Riset	Pekanbaru, 16 Desember 2019 M 18 Rabiul Akhir 1441 H								
<p>Kepada Yth. Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan di Tempat</p> <p>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</p> <p>Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Desri Helen Sutama</td> </tr> <tr> <td>NIM.</td> <td>: 11673201429</td> </tr> <tr> <td>Jurusan</td> <td>: Akuntansi</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: VII (Tujuh)</td> </tr> </table> <p>bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Pengaruh Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Studi pada Kantor Inspektorat Kabupaten Solok Selatan)" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.</p> <p>Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Dekan,</p> <div style="text-align: right;">  Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM NIP. 19620512 198903 1 003 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>		Nama	: Desri Helen Sutama	NIM.	: 11673201429	Jurusan	: Akuntansi	Semester	: VII (Tujuh)
Nama	: Desri Helen Sutama								
NIM.	: 11673201429								
Jurusan	: Akuntansi								
Semester	: VII (Tujuh)								



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Padang Aro-Muaralabuh KM.1, Timbulun Kec. Sangir Kode Pos 27778
Telp 0755-7575043 Fax 0755-7575043 email : dpmptsp.solssel@gmail.com

IZIN PENELITIAN

NO: 070/1669/DPMPTSP/II/2020

Berdasarkan surat permohonan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.VII/PP.00.9/7624/2019 Tanggal 16 Desember 2019, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama	: Desri Helen Utama
Tempat/Tanggal Lahir	: Sungai Lambai / 5 Desember 1998
KTP	: 1311014512980003
Alamat	: Sungai Lambai, Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir Kab. Solok Selatan Prov. Sumatera Barat
Judul Penelitian	: "PENGARUH PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) (STUDI PADA KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN SOLOK SELATAN)"
Lokasi Penelitian	: Kantor Inspektorat Kabupaten Solok Selatan
Masa Berlaku	: 14 Februari 2020 s/d 14 Mei 2020


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian/survey;
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA maupun kepada institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian;
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan kebijaksanaan masyarakat setempat;
4. Mengirimkan Laporan Hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) berkas kepada Bupati Solok Selatan Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Solok Selatan;
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Surat Izin Penelitian akan dicabut dan batal demi hukum.
6. Apabila masa berlaku habis dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Padang Aro
Pada Tanggal : 14 Februari 2020

KEPALA,


GUSNAWATI, S.Sos, MM
NIP. 196108171981032005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro (Sebagai Laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Desri Helen Utama, lahir di Sungai Lambai 5 Desember 1998, Penulis merupakan anak kedua dari Ayahanda Joni Hendri dan Ibunda Lopiarni. Penulis beralamat di Sungai Lambai Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari SD N 07 Sungai Lambai pada Tahun 2004-2010, kemudian pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Lubuk Gadang dan lulus pada tahun 2013,, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Gunung Talang. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan S-1 Akuntansi..

Dengan berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Pengaruh Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)”** dibawah bimbingan Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA Pada tanggal 12 Oktober 2020 penulis dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai Sangat Memuaskan dan menyandang gelar Sarjana (S).